

HASIL PENELITIAN

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA JAYAPURA

PERIODE 2001 - 2010

DISUSUN OLEH

**VERDI PAYUNG TAPPI
P07 002 09 013**



JURUSAN EKONOMI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab karena berkat kemurahan, kasih, dan pertolongan-Nya, mulai dari awal sampai selesainya tesis ini, penulis benar-benar merasakan campur tangan Tuhan.

Dalam proses penyusunan tesis ini banyak hal-hal yang dihadapi penulis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Prof. Dr. Hj. Rahmatia, MA dan Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si selaku pembimbing yang dengan sabar membimbing, mengoreksi, dan mengarahkan penulis dalam menyusun hingga selesainya tesis ini, dan juga ucapan yang sama penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Paulus Uppun, MA, Ibu Indraswati Tri Abdireviane, SE., MA dan Bapak Syarkawi Rauf, SE.,ME, yang telah menguji dan banyak memberikan masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian tesis ini. Bapak Dr. Agusalm, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Pembangunan dan Perencanaan serta dosen-dosen Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang senantiasa mendharma baktikan tugasnya dalam menuangkan ilmunya kepada kami sebagai mahasiswa/l selama perkuliahan.

Terima kasih juga kepada Bapak Sekda Kota Jayapura serta instansi terkait lainnya yang telah memberikan ijin kepada penulis melakukan penelitian di Kota Jayapura dimana penulis telah memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Spesial ucapan terima kasih kepada bapak Maryunus tappi, istriku Yulianti Paende, SE serta anak-anak tercinta Rila, Dekon, Meldri dan saudara-saudaraku, yang telah banyak memberikan dukungan moral maupun moril, terutama dukungan Doanya dan juga kepada teman-teman ekonomi pembangunan dan perencanaan pascasarjana Unhas angkatan 2009 atas bantuan dan kerjasamanya selama dalam proses perkuliahan.

Dalam segala sisi kehidupan manusia, tidak ada yang sempurna sebab kesempurnaan hanya pada Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena itu penulis menyadari bahwa keberadaan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga semua masukan baik berupa kritik maupun saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tesis ini.

Penulis berharap kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan dan dapat memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya.

Makassar, Agustus, 2011,

Verdi Payung Tappi.

ABSTRAK

VERDI PAYUNG TAPPI, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura Periode 2001 - 2010 (Dibimbing oleh **Rahmatia** dan **Sanusi Fattah**)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung, belanja langsung dan belanja tidak langsung, terhadap pertumbuhan ekonomi kota Jayapura melalui rumah tangga miskin dan inflasi serta untuk mengetahui besarnya pengaruh rumah tangga miskin maupun inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi kota Jayapura.

Penelitian dilakukan di kota Jayapura dengan menggunakan data sekunder selama 10 tahun. Data diolah dengan menggunakan AMOS 18 dengan model *Structural Equation Modeling (SEM)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara dua variabel yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rumah tangga miskin berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Jayapura.

Kata Kunci : belanja langsung, belanja tidak langsung, rumah tangga miskin, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

ABSTRACT

Verdi Payung Tappi, *Economic Growth Analysis City of Jayapura Period 2001 - 2010* (Supervised by **Rahmatia** and **Sanusi Fattah**)

The study aims to determine the effect of direct and indirect, direct spending and indirect spending, the city of Jayapura on economic growth through the poor households and inflation as well as to determine the magnitude of the effect of poor households and inflation on economic growth the city of Jayapura.

The study was conducted in the city of Jayapura using secondary data for 10 years. Data processed using AMOS 18 with model Structural Equation Modeling (SEM).

Results showed that among the two variables is direct spending and indirect spending and significant positive effect on economic growth, while poor households are not significantly negative effect, while inflation is not significant positive effect on economic growth in the city of Jayapura.

Keywords : Direct spending, Indirect Spending, Poor Households, Inflation and Economic Growth.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahaan	ii
Halaman Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis	14
A.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	14
A.2. Teori Pertumbuhan Solow-Swan.....	15
A.3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar	17
A.4. Pendekatan konsep Pengeluaran Pemerintah	19
A.5. Pendekatan konsep efisiensi, efektivitas , belanja tidak langsung dan belanja langsung	22
A.6. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi	30
A.7. Teori Kemiskinan	42

A.6. Teori Inflasi	52
B. Penelitian Terdahulu	59
C. Kerangka Pikir	61
D. Hipotesis	62

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	64
B. Jenis dan Sumber Data	64
C. Metode Analisis Data	65
D. Defenisi Opersional	68

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Jayapura	70
A.1 Letak Geografis, Batas dan Luas Wilayah	73
A,2 Topografi	75
A.3 Iklim dan Musim	75
A.4 Pemanfaatan Sumber Daya Alam	76
A.5 Penduduk dan Kepadatannya	77
B. ANALISIS HASIL PENELITIAN	
B.1 Perkembangan APBD Kota Jayapura	79
B.2 Perkembangan Belanja Daerah Kota Jayapura	80
B.3 Perkembangan PDRB Kota Jayapura	81

B.4. Keadaan Penduduk dan Rumah Tangga Miskin	82
C. Hasil Analisis Variabel yang Mempengaruhi Pertumbuhan	
Ekonomi	84
C.1. Direct Effect	84
C.2. Indirect Effect	87
C.3. Total Effect	87
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Pengaruh Belanja Langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui	
A.1. Rumah Tangga Miskin	90
A.2. Inflasi	93
A.3 Pengaruh Belanja Langsung terhadap	
Pertumbuhan Ekonomi	95
B. Pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi	
melalui	
B.1. Rumah tangga miskin	97
B.2. Inflasi	98
B.3. Pengaruh Langsung belanja tidak langsung terhadap	
pertumbuhan Ekonomi	99
C. Pengaruh rumah tangga miskin terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	101
D. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan	103
E. Efisiensi Penggunaan Belanja Daerah	105
F. Efektivitas Penggunaan Belanja Daerah	108

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Pengaruh Langsung, tdk Langsung, Total	68
4.1 Nama Kampung dan Kelurahan	74
4.2 Pemanfaatan Kawasan	76
4.3 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk	77
4.4 Perkembangan APBD Kota Jayapura	79
4.5 Perkembangan Belanja Daerah Kota Jayapura	81
4.6 Perkembangan PDRB Kota Jayapura	82
4.7 Penduduk Miskin	83
4.8 Hasil Estimasi Pengaruh Langsung Antar Variabel	85
4.9 Ringkasan Pengujian Hipotesis	88
5.1 Efisiensi Belanja Daerah Kota Jayapura	106
5.2 Efektivitas Anggaran Belanja Daerah	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir	62
Gambar 2 Nilai Koefisien	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah yang berimplikasi terhadap peningkatan kemakmuran rakyat, masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dari satu periode ke periode lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang yang dilaksanakan dalam suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat, disini kita melihat

aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya, penambahan potensi memproduksi kerap kali lebih besar dari penambahan produksi yang sebenarnya, dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. Bertambahnya jumlah penduduk ini berarti angkatan kerja juga selalu bertambah. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi yang mampu diciptakan lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja, hal ini mendorong terjadinya pengangguran. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan pemerataan ekonomi (*economic stability*) melalui retribusi pendapatan (*income redistribution*) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dengan adanya mekanisme penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi suatu negara. Begitu juga halnya dengan investasi yang merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha

menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang ditujuh bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investasi asing.

Pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi negara karena tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan, dalam literatur ekonomi makro, tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, makin tinggi produk domestik bruto per kapita, makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, agar PDB meningkat maka perekonomian harus bertumbuh dan harus lebih tinggi dari pada tingkat pertambahan penduduk, selain itu dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat berarti output yang dihasilkan juga meningkat.

Teori Keynes. Teori ini menyatakan, bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan perekonomiannya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia sehingga timbul apa yang disebut dengan *inflationary gap* (celah inflasi).

Inflationary gap ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan keinginan mereka menjadi permintaan efektif akan barang-barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana

untuk mengubah keinginannya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Golongan masyarakat ini, mungkin adalah pemerintah sendiri yang menginginkan bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan melakukan defisit anggaran belanja yang ditutup dengan mencetak uang baru. Golongan ini mungkin juga pihak swasta yang ingin melakukan investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit bank. Golongan ini bisa juga dari serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji para anggotanya melebihi kenaikan produktivitas kerja buruh. Apabila permintaan efektif dari golongan-golongan masyarakat tersebut, pada harga-harga yang berlaku, melebihi jumlah maksimum barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, maka inflationary gap akan timbul. Akibatnya, akan terjadi kenaikan harga-harga barang.

Kemiskinan masih merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah baik pusat maupun daerah yang sampai saat ini belum terpecahkan, meskipun beraneka ragam teori telah berupaya mencari penjelasan mengapa terjadi proses kemiskinan, secara garis besar, kemiskinan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan alamiah (Nasution, 1996). Kemiskinan struktural sering disebut sebagai kemiskinan buatan, baik langsung maupun tidak langsung kemiskinan kategori ini umumnya disebabkan oleh tatanan kelembagaan yang mencakup tidak hanya tatanan organisasi tetapi juga mencakup masalah aturan permainan yang diterapkan. Sedangkan kemiskinan alamiah lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Pada kondisi sumberdaya

manusia dan sumberdaya alam lemah/terbatas, peluang produksi relatif kecil atau tingkat efisiensi produksinya relatif rendah.

Dari sudut Pandang regional, informasi perkembangan ekonomi yang sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan dan evaluasi serta perencanaan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional tiap tahun. PDRB merupakan salah satu ukuran kemajuan dalam suatu masyarakat karena dapat mencerminkan kemampuan atau keberhasilan dalam memperoleh pendapatan. Uraian di atas memperlihatkan betapa pentingnya pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara oleh karena itu, upaya-upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi di setiap negara. Target pertumbuhan ekonomi tersebut diupayakan tercapai melalui intervensi pemerintah. intervensi oleh pemerintah dapat dilakukan melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang dilaksanakan oleh dua institusi yang berbeda, yaitu institusi moneter oleh Bank Indonesia dan institusi fiskal oleh pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui pajak serta pembelanjaan dan kebijakan moneter dilakukan untuk mempengaruhi suku bunga dan kondisi-kondisi perkreditan melalui pengendalian jumlah uang beredar (Samuelson, et. al. 1996).

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan, dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk

memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Djojohadikusumo (1993) dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana dan prasarana produksi.

Pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, juga mempunyai kepentingan terhadap pertumbuhan ekonominya. Namun ada beberapa keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonominya, dalam melaksanakan kebijakan fiskal, pemerintah daerah hanya bisa mempengaruhi perpajakan yang menjadi kewenangannya yang berupa pajak daerah dan pembelanjaan melalui APBD yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal kebijakan moneter, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukannya.

Pemberian status khusus bagi propinsi Papua, seperti pemberian otoritas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan alokasi penerimaan keuangan yang juga semakin besar dibandingkan periode-periode sebelumnya diharapkan dapat memberikan perubahan positif yang signifikan. Namun demikian, jika dicermati aspek normatif dalam Undang-undang tersebut, tetap saja akan memunculkan konsekuensi adanya peluang dan ancaman yang sama besarnya, karena di satu aspek akan semakin besar

peluang bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup rakyat Papua, akan tetapi pada saat yang sama dan pada aspek lain terbuka lebar pula ancaman penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik di kota Jayapura (eksekutif dan legislatif) bagi kepentingan kelompok dan golongan. Perjalanan 12 tahun Otsus Papua membuktikan munculnya konflik kontra produktif antara kelompok dan golongan dalam memperebutkan jabatan birokrasi dan legislative serta penyalahgunaan dana – dana pembangunan bagi kepentingan kelompok dan golongan dan cenderung mengabaikan aspek pelayanan terhadap kesejahteraan rakyat.

Kota Jayapura sebagai satu-satunya kota administratif di provinsi Papua yang ada tentunya tidak terlepas dari konteks persoalan yang sama. Keberadaannya sebagai Ibu kota Provinsi Papua sendiri memiliki arti yang cukup strategis selain sebagai kotamadya, karenanya kemudian kota Jayapura selalu diidentikkan dengan pusat pengambilan keputusan untuk kebijakan pembangunan di Provinsi Papua sehingga sedikit banyak menjadi tolak ukur kegagalan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Papua.

Pemberlakuan status Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, banyak pihak berharap agar pembangunan di Papua mengalami percepatan yang signifikan dan mampu mengejar ketertinggalannya di bandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, setelah 11 tahun pemberlakuan Otonomi Khusus Papua, masih banyak kekurangan yang di temukan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus itu sendiri. Tujuan utama dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dalam rangka percepatan pembangunan di Papua belum dapat

di realisasikan sepenuhnya. Hal ini tentunya mengundang pertanyaan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terutama masyarakat Papua sendiri. Dana Otonomi Khusus yang sudah relatif besar sudah di kucurkan pemerintah Pusat ke daerah dan kewenangan pengelolaannya sebagian besar sudah ada di tangan Pemerintah Daerah, tetapi apa yang salah dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, bagaimana sebenarnya peran dan keterlibatan masyarakat Papua dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua, serta kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi maupun kota untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua melalui Otonomi Khusus.

Selain dana otonomi khusus kebijakan pemerintah daerah menggandeng swasta, dalam hal ini sebagai investor akan meningkatkan investasi di Kota Jayapura, hal tersebut akan berdampak secara langsung pada penerimaan anggaran dan secara luas terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran yang muaranya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan kota yang merupakan daya tarik bagi investor lainnya (*multiplier effect*). Diusahakan iklim tersebut dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kemajuan secara dinamis akan dapat diwujudkan secara riil, hal mana sekaligus merealisasikan elemen mandiri dari visi Kota Jayapura Beriman, Maju, Mandiri dan Sejahtera, agar pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maka perlu dilaksanakan penetapan skala prioritas pada bidang yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti: Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, ketenagakerjaan, Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan

ekonomi, dengan tetap memperhatikan tuntutan dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Gambaran mengenai kondisi rumah tangga miskin, inflasi dan penerimaan pemerintah Kota Jayapura yang menjadi acuan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah seperti pada lampiran penelitian ini, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, nampak bahwa penerimaan pemerintah kota Jayapura sejak tahun 2001 terus mengalami peningkatan dan tahun 2009, 2010 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2008 ke bawah sedangkan disisi lainnya penurunan rumah tangga miskin penurunannya tidak signifikan.

Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi. Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah merupakan bentuk dari akumulasi modal pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peranan strategis dari investasi pemerintah ini sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di

bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah menuntut adanya suatu kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah sendiri, upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan pada kondisi dan item tertentu saja, karena secara umum upaya tersebut justru dapat meningkatkan beban yang harus ditanggung masyarakat. Salah satu sudut pandang kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian terutama dalam hal pendistribusian anggaran, sehingga dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah. Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja tidak langsung karena variabel ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan prasarana ekonomi dan sosial seperti jalan, jembatan dan pembangunan prasarana sektor-sektor ekonomi lainnya.

Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarnya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Pemerintah Kota Jayapura dari tahun 2001 sampai dengan 2010 dapat dilihat dalam lampiran 2. Variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah antara lain akumulasi modal dalam hal ini besar kecilnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, peranan pemerintah daerah di dalam kegiatan ekonomi tercermin pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, dimana variabel pengeluaran pembangunan dapat diartikan sebagai besarnya investasi oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana

yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Berdasarkan data yang ada, ternyata secara nominal pengeluaran pembangunan Pemerintah Kota Jayapura yang digunakan untuk kepentingan publik guna mencapai sasaran-sasaran program yang telah ditetapkan jauh lebih kecil dibandingkan pengeluaran rutinnya, seperti yang ditunjukkan pada lampiran dua penelitian ini dimana perkembangan pengeluaran pemerintah baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun, peningkatan yang signifikan terjadi mulai dari tahun 2006 – 2010.

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya di indikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura sebagai Ibu Kota Propinsi Papua seperti pada tabel 4.6, dimana pada tahun 2010 harga konstan sebesar 10.07 persen, laju pertumbuhan PDRB ini lebih kecil dari pertumbuhan PDRB pada tahun 2009 yang mencapai 12.86 persen, turunnya angka laju pertumbuhan PDRB Kota Jayapura tahun 2010 disebabkan oleh cakupan unit kegiatan ekonomi yang semakin berkurang dan tidak didukung dengan penggunaan belanja daerah secara efisien dan efektif.

Efisiensi pengeluaran pemerintah secara matematis menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dikategorikan efisien karena tingkat efisiensi rata-rata pertahun mencapai 91,88 persen, dimana hanya 2 tahun terakhir yang tidak efisien

karena mengalami defisit anggaran dimana pemerintah kota Jayapura melakukan pinjaman, tetapi walaupun efisien tapi tidak secara signifikan memacu pertumbuhan ekonomi.

Untuk menilai suatu kegiatan efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh pencapaian tujuan yang telah dicapai dengan baik atau sebaliknya. Dalam hubungannya dengan penggunaan belanja daerah, pengukuran efektivitas belanja daerah dapat menjelaskan secara konkrit sejauh mana anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, walaupun dikatakan sudah efektif tetapi belum memberikan kontribusi yang baik bagi perekonomian daerah, dimana perkembangan belanja daerah tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah belanja langsung berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rumah tangga miskin dan inflasi?;
2. Apakah belanja tidak langsung berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rumah tangga miskin dan inflasi?;

3. Apakah rumah tangga miskin dan inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ?;

C. Tujuan Penelitian

- C.1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel belanja langsung, terhadap pertumbuhan ekonomi kota Jayapura melalui rumah tangga miskin dan inflasi.
- C.2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kota Jayapura melalui rumah tangga miskin dan inflasi.
- C.3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh rumah tangga miskin dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- D.1. Diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh rumah tangga miskin, laju inflasi baik langsung maupun tidak langsung melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura.
- D.2. Diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan khususnya Pemerintah Kota Jayapura dalam menggunakan anggaran secara efisien dan efektif di masa mendatang dan juga sebagai bahan evaluasi.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

A.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai "kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu "proses" bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat, disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu

perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan "*output perkapita*". Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Boediono, 1992).

A.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan

Menurut teori ini garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod-Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini yaitu: 1. Tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, 2. Adanya fungsi produksi $Q = f(K, L)$ yang berlaku bagi setiap periode, 3. Adanya kecenderungan menabung (*prospensity to save*) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output (Q). Tabungan masyarakat $S = sQ$; bila Q naik S juga naik, dan sebaliknya, 4. Semua tabungan masyarakat di investasikan $S = I = \Delta K$. Sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka dari output disisakan sejumlah proporsi untuk ditabung dan kemudian di investasikan. Dengan begitu, maka terjadi penambahan stok kapital (Jhingan, 2004).

Solow menganggap output di dalam perekonomian sebagai suatu keseluruhan, sebagai satu-satunya komoditi, dimana laju produksi tahunannya dinyatakan sebagai $Y(t)$ yang menggambarkan pendapatan nyata masyarakat, sebagian daripadanya dikonsumsi dan sisanya ditabung dan diinvestasikan, bagian yang ditabung S adalah konstan dan laju tabungan adalah $sY(t)$. $K(t)$ adalah stok modal, jadi investasi netto adalah laju kenaikan stok modal ini yaitu dk/dt atau K dengan demikian persamaan pokoknya adalah $K = sY$.

Model Solow dapat menunjukkan arah pertumbuhan keadaan mantap serta situasi pertumbuhan jangka panjang yang ditentukan oleh peranan tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang semakin luas, seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana pertumbuhan dalam *capital stock*, pertumbuhan tenaga kerja dan perkembangan teknologi mempengaruhi tingkat *output*, untuk menjelaskan teori pertumbuhan Solow maka pertama akan dianalisis bagaimana peranan stok modal dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi tanpa adanya perkembangan.

Proses pertumbuhan ekonomi dalam keadaan dimana teknologi tidak berkembang, maka tingkat pertumbuhan yang telah dicapai hanya karena adanya perubahan jumlah modal dan jumlah tenaga kerja, hubungan kedua faktor tersebut dengan pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan sebagai fungsi produksi, jika jumlah modal naik maka, jumlah *output* akan meningkat, jika tenaga kerja meningkat, maka jumlah output akan meningkat sebesar *marginal product of labour* dikalikan pertambahan tenaga kerja, perubahan ini akan lebih

realistis apabila kedua faktor produksi ini berubah, yaitu terjadi perubahan modal serta terjadi perubahan jumlah tenaga kerja, kita dapat membagi perubahan ini dalam dua sumber penggunaan *marginal products* dari dua *input* : pertama adalah perubahan *output* yang dihasilkan dari perubahan kapital dan yang kedua adalah perubahan *output* yang disebabkan oleh adanya perubahan tenaga kerja.

Pertumbuhan *total factor productivity* tidak bisa dilihat secara langsung, maka diukur secara tidak langsung dihitung dengan cara *Total factor productivity* dapat berubah dengan beberapa alasan. Perubahan sering dikaitkan dengan kenaikan pengetahuan pada metode produksi. *Solow residual* sering juga digunakan untuk mengukur perkembangan teknologi. Faktor-faktor produksi seperti pendidikan, regulasi pemerintah dapat mempengaruhi *total factor productivity*. Sebagai contoh, jika pengeluaran pemerintah meningkat maka akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, para pekerja akan menjadi lebih produktif dan *output* juga akan meningkat, yang mengimplikasikan *total factor productivity* yang lebih besar. (Mankiw, 1997).

A.3. Teori Pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori Harrod-Domar ini mempunyai asumsi yaitu: 1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh, 2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, 3. Besarnya

tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol, 4. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save* = MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*capital-output ratio* = COR) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio* = ICOR).

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR). Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh (Lincoln, 2004).

Teori Pertumbuhan Keynesian (Harrod-Domar) menganalisis tentang syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap (*steady growth*). Menurut Harrod Domar investasi memberikan peranan kunci dalam prosers pertumbuhan yang disebabkan karena : 1). Investasi dapat menciptakan pendapatan yang merupakan dampak dari penawaran, 2). Investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal yang merupakan dampak dari penawaran.

Persamaan model Harrod Domar mencoba menjelaskan bahwa tambahan modal dalam suatu periode t menjadi sumber dasar bagi bertambahnya hasil produksi di periode tertentu ($t + 1$). Investasi pada saat ini meningkatkan kemampuan produksi dan menambah pendapatan di masa datang.

A.4. Pendekatan tentang Konsep Pengeluaran Pemerintah

Aspek pengeluaran pemerintah dalam kajian tentang keuangan Negara maupun daerah merupakan aspek dari penggunaan sumber daya ekonomi secara langsung yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung yang dimiliki oleh masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang ditempuh oleh suatu pemerintahan. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut terdapat berbagai teori yang menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah, teori-teori tersebut dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro, secara mikro tujuan dari teori perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.

Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Lebih lanjut, perkembangan pengeluaran pemerintah secara mikro

dapat dijelaskan dengan beberapa faktor yakni perubahan permintaan akan barang public, perubahan dari aktivitas pemerintah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, perubahan kualitas barang public, perubahan harga faktor-faktor produksi. Barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah memilih jumlah barang/jasa yang dihasilkan. Selain itu, pemerintah juga menentukan jumlah pajak yang akan dikenakan kepada masyarakat untuk membiayai barang/jasa publik tersebut dalam menentukan jumlah barang dan jasa publik yang disediakan.

Dalam tatanan makro pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa $Y = C+I+G+(X-M)$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y sebagai variabel dependen melambangkan pendapatan nasional (dalam arti luas), sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*). Dumairy (dikutip oleh Diah Pradonowati, 2009) mengatakan bahwa dengan membandingkan nilai G terhadap Y, serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.

Teori W. W. Rostow, menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisional (*the traditional society*), pra syarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take off*), tinggal

landas (*the take-off*) menuju kedewasaan (*the drive to maturity*) dan masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*). Rostow berpendapat bahwa yang menjadi dasar perbedaan tahap pembangunan ekonomi tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, social dan politik yang terjadi di masyarakat.

Mazhab Analitis, teori yang tergabung dalam mazhab ini berusaha mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi secara logis dan konsisten, tetapi sering bersifat abstrak dan kurang menekankan kepada aspek empiris (*histories*). Teori Pertumbuhan Klasik, ahli-ahli ekonomi yang tergabung dalam kelompok ini adalah Thomas Robert Malthus, Adam Smith dan David Ricardo. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah, kekayaan alam dan teknologi yang digunakan, Smith (dalam Sukirno, 2000) menyatakan bahwa mekanisme pasar akan menciptakan suatu suasana yang mengakibatkan perekonomian berfungsi secara efisien.

Perkembangan pasar juga akan menaikkan pendapatan nasional dan pertumbuhan penduduk dari masa ke masa yang terjadi bersama-sama dengan kenaikan pendapatan nasional, akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak sedangkan Malthus dan Ricardo (Sukirno, 2000) berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan kembali ke tingkat subsisten. Pada mulanya ketika jumlah penduduk/tenaga kerja relatif sedikit dibandingkan dengan faktor produksi lain, maka penambahan penduduk/tenaga kerja akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Akan tetapi apabila jumlah penduduk/tenaga kerja

berlebihan dibandingkan dengan factor produksi lain, maka penambahan penduduk/tenaga kerja akan menurunkan produksi per kapital dan taraf kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2000) faktor produksi tanah (sumberdaya alam) tidak bisa bertambah sehingga akhirnya menjadi factor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat Ricardo (dalam Arsyad, 1999).

Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya bisa memperlambat bekerjanya *the law of diminishing return* yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal (Arsyad, 1999).

A.5. Pendekatan tentang Konsep Efisiensi, Efektivitas, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Menurut Kuncoro (2009); Basuki (2009), belanja daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta klasifikasi menurut kelompok belanja, yaitu terdiri dari belanja; (i) Belanja langsung; belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan, terdiri; (a). Belanja pegawai yang digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, (b). Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, (c). Belanja modal/investasi yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. (ii) Belanja tak langsung; merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok biaya tak langsung, dibagi dalam jenis belanja terdiri dari; (a). Belanja pegawai; merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pengertian belanja pegawai termasuk uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (b). Belanja bunga; digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang, (c). Belanja subsidi; digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa layanan umum masyarakat, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, (d). Belanja hibah; digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik ditetapkan peruntuknya, (e). Bantuan sosial; digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik. (f). Belanja bagi hasil; digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan

kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, (g). Bantuan keuangan; digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, (h). Belanja tidak terduga; digunakan untuk menganggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Menurut Chester I. Barnard (dalam Prawirosentono, 1999), menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut : Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak. Disamping itu, menurut Chester Barnard, (dalam Prawirosentono, 1999), pengertian efektif dan efisien dikaitkan dengan system kerjasama seperti dalam organisasi perusahaan atau lembaga pemerintahan, sebagai berikut : (Efektifitas dari usaha kerjasama (antar individu) berhubungan

dengan pelaksanaan yang dapat mencapai suatu tujuan dalam suatu system, dan hal itu ditentukan dengan suatu pandangan dapat memenuhi kebutuhan system itu sendiri. Sedangkan efisiensi dari suatu kerjasama dalam suatu system (antar individu) adalah hasil gabungan efisiensi dari upaya yang dipilih masing-masing individu). Dalam bahasa dan kalimat yang mudah hal tersebut dapat dijelaskan bahwa : efektifitas dari kelompok (organisasi perusahaan) adalah bila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan efisien berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan. Bila pengorbanannya dianggap terlalu besar, maka dapat dikatakan tidak efisien.

Menurut Peter Drucker dalam Menuju SDM Berdaya (Kisdarto, 2002), menyatakan : efektifitas adalah melakukan hal yang benar : sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar. Atau juga efektifitas berarti sejauhmana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat.

Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumberdaya (*input*), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau lajim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya tanpa mencapai sasaran atau penghambur-hamburan sumber daya. Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (*mearsurable*), sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan

(*input*) akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai penghematan, karena bisa mengganggu operasional, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktifitasnya akan juga tidak setinggi yang diharapkan.

Pengeluaran yang bersifat tidak langsung digunakan untuk membiayai kebutuhan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Pengeluaran ini mutlak harus dilaksanakan dan sifat pengeluaran ini merupakan pengeluaran *operating catagories* dan konsumtif, untuk belanja langsung yang ciri spesifiknya adalah *investment catagories*, dimana penggunaan pembiayaan ini untuk membiayai fungsi *agent of development* dan dari pengeluaran ini akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian. Kondisi keterbatasan pendapatan suatu daerah perlu diupayakan adanya penghematan belanja tidak langsung secara sungguh-sungguh, kecuali untuk komponen dana belanja pegawai. Penghematan belanja tidak langsung non pegawai sebaiknya dilakukan rasionalisasi belanja yang diikuti dengan peningkatan disiplin anggaran untuk pemenuhan kebutuhan riil setiap dinas atau kantor. belanja tidak langsung secara umum terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain.

Menurut Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 903/2753 SJ tanggal 17 November 2000 (dalam Lesminingsih 2001) dijelaskan bahwa: Belanja Pegawai, pengeluaran belanja pegawai dialokasikan

antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, honorarium, uang lembur, upah pegawai harian tetap, biaya perawatan dan pengobatan pegawai. Belanja Barang, Pengeluaran belanja barang dialokasikan antara lain untuk berbagai kebutuhan seperti biaya pemeliharaan kantor, pembelian inventaris kantor, biaya pendidikan, biaya perpustakaan, biaya hansip, pakaian dinas dan lain-lain.

Belanja pemeliharaan penyediaan belanja langsung diprioritaskan untuk memelihara sarana dan prasarana pelayanan umum dalam rangka mempertahankan/meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat, alokasi pengeluaran ini diantaranya biaya pemeliharaan gedung kantor, inventaris kantor, rumah dinas, dan lain-lain. Belanja perjalanan dinas dialokasikan antara lain untuk biaya perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas tetap, biaya perjalanan dinas pindah, dan lain-lain. Belanja lain-lain, pasal belanja lain-lain hanya untuk menampung kredit anggaran yang tidak dapat disediakan pada belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas, misalnya uang perangsang, biaya observasi dan lain-lain.

Pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan yang lebih menentukan di dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional / daerah Todaro (1997). Menurut Jones (1976) bahwa infrastruktur (*social overhead capital*) seperti jalan, jembatan dan pelabuhan walaupun tidak memberikan kontribusi secara langsung pada produksi output, tetapi infrastruktur memberikan peranan yang essential dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah mengubah konsep dan kewenangan daerah yang ada selama ini. Undang-undang ini memiliki makna substansial dalam pemberian kewenangan daerah yang semula ditujukan atas dasar porsi kebijakan pusat yang menonjol dalam pembagian kewenangan pusat-daerah selanjutnya diarahkan menjadi kemandirian daerah dalam mengelola kewasannya termasuk kebijakan-kebijakan pembiayaan. Konsekuensi logis dari hal tersebut berdampak terhadap kemajuan perekonomian daerah yang pada akhirnya terciptanya peningkatan pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu sudah menjadi tuntutan daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Menurut Todaro (1999) ada tiga faktor atau komponen utama yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ketiganya adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Menurut Mangkoesoebroto (1998) Peranan pemerintah yang harus dijalankan adalah : Peranan alokasi yaitu pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang pihak swasta tidak dapat memproduksinya, peranan distribusi yaitu pemerintah melalui kebijaksanaan fiskal merubah keadaan masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diharapkan melalui pengenaan pajak progresif yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi yang mampu dan meredistribusikan bagi yang kurang mampu, peranan stabilisasi yaitu pemerintah membuat kebijakan-

kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan goncangan ekonomi yang berlebihan.

Mustopadidjaya (dalam Ekawati 2001) dikatakan bahwa anggaran belanja pembangunan ini disusun untuk mencerminkan pola kebijaksanaan, prioritas dan program pembangunan untuk setiap anggaran. Sejalan dengan bertambah besarnya kemampuan keuangan daerah dan semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan, maka jumlah anggaran pembangunan setiap tahun menunjukkan peningkatan. Dari uraian diatas, nampak pentingnya alokasi dana oleh pemerintah melalui pengeluaran yang dilakukan pada sektor bidang pembangunan daerah, manfaat yang diperoleh dari pengalokasian ini adalah mendorong pembangunan daerah dan sisi Lain juga menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan melalui penyusunan dana ke sektor yang secara potensial ataupun riil memiliki faktor-faktor yang menyebabkan suatu daerah akan cepat berkembang.

Terciptanya Otonomi Daerah memerlukan suatu proses transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabuapten/Kota belum mengalami pergeseran yang cukup berarti, dimana pemerintah daerah belum mengambil kebijakan yang tepat dalam pengalokasian anggaran bagi sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja

Alokasi anggaran adalah terpenuhinya azas keadilan yang mempertimbangkan program prioritas dan terpenuhinya ruang lebih luas bagi

peran serta masyarakat, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas publik. Kebijakan pengalokasian anggaran diarahkan untuk mengurangi ketidakseimbangan antara anggaran propinsi dan kabupaten/kota. Alokasi anggaran selama ini belum memperlihatkan adanya keseimbangan yang sehat antara anggaran provinsi dengan kotamadya, sehingga menimbulkan kesenjangan vertikal yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pembangunan secara keseluruhan.

A.6. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Mangkoesebroto (1997) menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kredibilitas sistem pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori pengeluaran makro dan mikro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu; model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah dan Teori Peacock & Wiseman (dalam Mangkoesebroto 1988). Teori perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi tahap awal, menengah dan lanjut. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap *Gross National Product* (GNP) semakin besar dan persentase

pemerintah semakin kecil. Pada tingkat yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Lain halnya dengan hukum Wagner yang justru mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun meningkat.

Keynesian menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam mengatasi fluktuasi kegiatan ekonomi dan menciptakan kestabilan serta pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, akan tetapi Keynesian lebih mementingkan pada kebijakan fiskal, anggaran belanja umumnya terbagi menjadi dua bagian yaitu anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung, dimana besarnya alokasi anggaran pengeluaran pemerintah didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat pendapatan, potensi ekonomi, kecerdasan dan tingkat kemahalan.

Peacock dan Wiseman (1988), mengemukakan teori yang didasarkan pada pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar tersebut. Masyarakat mempunyai suatu toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai aktivitas pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat

kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Inti dari teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut; perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah, apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang, penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat, dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan tersebut disebut efek pengalihan (*displacement effect*).

Efek pengalihan ini adalah adanya suatu gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Selain itu banyaknya aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang disebut dengan efek inspeksi (*inspection effect*), adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta (*concentration effect*), adanya ketiga efek menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak turun kembali pada tingkat sebelum terjadinya perang.

Hipotesis yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman (1988) mendapat kritikan dari Bird yang menyatakan bahwa selama terjadinya

gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke aktivitas yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah dalam persentasinya terhadap GNP. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan persentase pengeluaran pemerintah terhadap GNP perlahan-lahan akan menurun kembali pada tingkat sebelum terjadinya gangguan, jadi menurut Bird, efek pengalihan hanya gejala dalam jangka pendek dan tidak terjadi dalam jangka panjang.

Tujuan dari teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang pemerintah (barang yang disediakan oleh pemerintah) dan menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut atas tersedianya barang pemerintah. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang pemerintah menentukan jumlah barang pemerintah yang akan disediakan melalui anggaran belanja, dan ini akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Jadi perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor yaitu; perubahan permintaan akan barang publik, perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, perubahan kualitas barang publik dan perubahan harga faktor-faktor produksi.

Soeparmoko (1987) mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah menjadi lima jenis yaitu; Pengeluaran yang *self liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa atau barang bersangkutan.

Misalnya pengeluaran untuk jasa perusahaan, pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang berpengaruh positif terhadap penerimaan pemerintah, misalnya pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya obyek pariwisata, pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan/perang meskipun saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangannya akan naik, pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak yatim piatu. Jika hal ini tidak dijalankan sekarang kebutuhan pemeliharaan tersebut akan menjadi lebih besar di masa yang akan datang. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Suparmoko (dalam Adisasmita (2001) yang dimaksud anggaran (budget) adalah suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi keragaman daerah, penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : a). Transparansi dan akuntabilitas anggaran, transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan

bertanggungjawab, mengingat anggaran merupakan salah satu saran evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab pemerintah mensejahterakan masyarakat. maka APBD harus memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan, selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, b). Disiplin Anggaran, APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meningkatkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus dilandaskan azas efisiensi, tepat guna tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilahan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat pembangunan/modal harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi pencampuran kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan kepada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, c). Keadilan anggaran, pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, d). Efisiensi dan efektifitas anggaran, dana yang

tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan, e). Format anggaran, pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (*deficit budget format*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun pengeluaran pemerintah secara keseluruhan sangat penting dalam sumbangannya terhadap Pendapatan Nasional, tetapi yang lebih penting lagi penentuan komposisi dan pengeluaran pemerintah tersebut.

Menurut Kunarjo (dalam Adisasmita 2001), mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan menurut sektor dan sub sektor. Kriteria yang digunakan untuk penentuan prioritas pada penglokasian dana pemerintah adalah: 1). Faktor lingkungan : geografi (termasuk daratan, kepulauan, kondisi tanah, cuaca dan sebagainya), 2). Faktor teknologi : pertumbuhan penduduk, struktur umur, kepadatan penduduk dan kemampuan penyerapan tenaga kerja, 3). Faktor ekonomi : pertumbuhan pendapatan nasional, tingkat pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan, distribusi pendapatan, perubahan harga (inflasi dan perubahan produktivitas, 4). Faktor

politis: ideologi, tingkat desentralisasi, 5). Faktor administrasi : sistem penganggaran dan tingkat birokrasi.

Soetrisno (1981) menjelaskan klasifikasi pengeluaran pemerintah yang digunakan baik pemerintah pusat maupun daerah terdiri dari dua klasifikasi pengeluaran: Pengeluaran / Belanja Rutin adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Pengeluaran rutin ini merupakan perkembangan istilah yang bersumber pada ICW (Indische Comptabiliteit-Wet Staatsblad 1923 nomor 448) belanja tidak langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan, dan belanja langsung adalah pengeluaran untuk pembangunan baik pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, gedung, maupun pembangunan non fisik spiritual termasuk penataran, training.

Pengeluaran Pembangunan atau belanja langsung, adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang non konsumtif, berbentuk investasi dalam proyek-proyek, baik dalam bentuk proyek fisik seperti pembangunan bendungan air maupun non fisik seperti proyek-proyek dalam pengembangan pendidikan, keagamaan dan sebagainya. Pelaksanaan belanja pembangunan dirinci ke dalam sektor-sektor tiap-tiap sektor dibagi ke dalam subsektor, masing-masing subsektor dirinci ke dalam program proyek, dan akhirnya untuk masing-masing proyek dirinci lagi ke dalam bagian anggaran (Hasan, 1994).

Pengeluaran pembangunan (belanja tidak langsung) merupakan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan dengan kata lain untuk meningkatkan kemakmuran secara merata dan serasi antar daerah dan antar golongan, dilaksanakan melalui upaya bidang ekonomi. Prioritas diberikan

kepada sektor-sektor yang merangsang dan menimbulkan dampak kegiatan ekonomi secara lebih luas dan intensif, kriteria ini sekaligus berarti perluasan lapangan dan kesempatan kerja, Jadi pengeluaran pembangunan yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai, kemudian indikator pengeluaran pembangunan dalam hal ini adalah berbagai proyek baik proyek fisik maupun proyek non fisik yang diprogramkan dalam setiap sektor maupun subsektor.

Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para inovator dengan inovasi-inovasinya. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah factor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan teknologi, produksi masyarakat akan berjalan lambat. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para inovator penyebab kumulatif (*Cumulative Causation Theory*) teori ini pada awalnya dikemukakan oleh Myrdal (1957) yang mengkritik teori neo-Klasik mengenai konsep pertumbuhan yang stabil. Myrdal menyatakan bahwa perbedaan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi antar daerah selamanya akan menimbulkan adanya "*backwash effect*" yang mendominasi "*spread effect*" dan proses pertumbuhan ekonomi regional merupakan proses yang tidak equilibrium.

Perbedaan utama dari teori neo-Klasik dan Myrdal adalah yang pertama menggunakan *constant return to scale* dan yang kedua menggunakan *increasing return to scale*. Perbedaan tingkat pertumbuhan antar wilayah

mungkin akan menjadi sangat besar jika *increasing return to scale effect* berlangsung terus.

Menurut Kaldor (1970) prinsip-prinsip dari penyebab kumulatif adalah penyederhanaan dari *increasing return to scale* di perusahaan. *Increasing return to scale* ini membantu memperkaya sementara dan mencegah meluasnya daerah miskin. Kekuatan pasar menyebabkan adanya pengelompokan aktivitas dengan *increasing return to scale* di area perekonomian tertentu, hal ini menimbulkan adanya eksternalitas atau internalitas di pusat aglomerasi. Keunggulan yang terbatas dari suatu daerah terbelakang (*backward region*), seperti tenaga kerja yang murah, tidak mencukupi untuk bersaing dengan aglomerasi ekonomis.

Model pertumbuhan agregat Glasson (1997) menyatakan bahwa teori pertumbuhan regional jangka panjang harus memperhitungkan faktor-faktor yang dianalisis jangka pendek yang diasumsikan konstan, seperti penduduk, upah, harga teknologi dan distribusi pendapatan. Mobilitas faktor-faktor terutama tenaga kerja dan modal harus menjadi pertimbangan yang sangat penting, pada umumnya orang sependapat bahwa pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen atau eksogen, yakni faktor-faktor yang terdapat pada daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah atau kombinasi dari keduanya.

Faktor-faktor penentu penting dari dalam daerah meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja dan modal. Sedangkan salah satu faktor penentu dari luar daerah yang penting adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut, suatu

pendekatan yang lebih baru untuk menjelaskan faktor penentu endogen dari pertumbuhan ekonomi regional adalah melalui penggunaan model ekonomi makro. Model ini berorientasi pada segi penawaran dan berusaha menjelaskan output regional menurut faktor-faktor regional tertentu yang masing-masing dapat dianalisa secara sendiri-sendiri

Menurut Sukirno (1985) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan pendapatan nasional berbagai tahun yang dihitung berdasarkan atas harga konstan, jadi perubahan dalam nilai pendapatan hanya semata-mata disebabkan oleh suatu perubahan dalam suatu tingkat kegiatan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dihitung melalui indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan baik apabila tingkat kegiatan ekonomi masa sekarang lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut Faried (1992) menerangkan dua konsep pertumbuhan ekonomi yaitu : 1). Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil. Output riil suatu perekonomian bisa juga tetap konstan atau mengalami penurunan. Perubahan ekonomi meliputi pertumbuhan, statis ataupun penurunan, dimana pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat positif sedangkan penurunan merupakan perubahan negative, 2). Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kenaikan output perkapita dalam hal ini pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup yang diukur dengan output total riil

perkapita. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi terjadi apabila tingkat kenaikan output total riil $>$ daripada tingkat pertumbuhan penduduk, sebaliknya terjadi penurunan taraf hidup actual bila laju kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan output total riil.

Pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Pada saat ini tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif, namun beberapa teori yang secara parsial dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakekatnya inti dari teori ekonomi regional tersebut berkisar pada metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah (regional).

Pengertian pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara

berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh (Djojohadikusuma, 1994). Namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhan akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Adanya keterkaitan yang erat antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ditunjukkan pula dalam sejarah munculnya teori-teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

A.7. Teori Kemiskinan

Kritik utama terhadap teori Malthus dan Neo Malthusian, yaitu :1). Teori itu tidak memperhitungkan peranan dan dampak dari kemajuan teknologi. 2). Teori itu didasarkan pada suatu hipotesa tentang hubungan secara makro antara pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan perkapita. 3). Teori itu merupakan perhatian kepada variabel yang keliru yaitu pendapatan perkapita sebagai faktor penentu utama tingkat pertumbuhan penduduk. Faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung : Tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (produktivitas tenaga kerja), tingkat inflasi, tingkat investasi, lokasi serta kualitas sumber daya alam, tingkat dan jenis pendidikan, etos kerja dan motivasi pekerja. Sektor pertanian merupakan pusat kemiskinan di Indonesia ada tiga faktor penyebab utama antara lain : 1). tingkat produktivitas yang rendah disebabkan oleh jumlah pekerja disektor tersebut terlalu banyak,

sedangkan tanah, kapital, dan teknologi terbatas serta tingkat pendidikan petani yang rata-ratanya sangat rendah. 2). daya saing petani atau dasar tukar domestik (*term of trade*) komoditi pertanian terhadap output industri semakin lemah. 3). tingkat diversifikasi usaha disektor pertanian ke jenis-jenis komoditi nonfood yang memiliki prospek pasar (terutama ekspor) dan harga yang lebih baik masih sangat terbatas.

Persoalan kemiskinan, langkah berikut adalah mencari solusi yang relevan untuk memecahkan problem itu (strategi mengentaskan kelompok miskin dari lembah kemiskinan), 1). Konsep Kemiskinan yaitu : kemiskinan absolute, kemiskinan relatif, kemiskinan subyektif. 2). Dimensi Kemiskinan yaitu : perspektif kultural (*cultural perspective*), perspektif struktural atau situasional (*situational perspective*), perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis : individual, keluarga, masyarakat.

Strategi besar pembangunan di masa lalu adalah mencapai pertumbuhan yang cepat dengan melakukan *trade-off* terhadap pemerataan, dalam atmosfer strategi ini, memunculkan budaya konglomerasi yang diharapkan akan menghasilkan *trickle down effect* kepada lapisan ekonomi dibawahnya. Pendekatan ini memfokuskan diri pada pembangunan industri secara besar-besaran, dimana kedudukan pemerintah memainkan peran mendorong kekuatan entrepreneur. Permasalahan yang timbul adalah kemacetan mekanisme *trickle down effect*, dimana mekanisme tersebut sebenarnya sangat diyakini akan terbentuk sejalan dengan meningkatnya akumulasi capital dan perkembangan institusi ekonomi yang mampu menyebarkan kesejahteraan yang merata. Dengan kata lain, di satu sisi

penerapan pendekatan ini berhasil membangun akumulasi kapital yang cukup besar, namun di sisi lain juga telah menciptakan proses kesenjangan secara simultan, baik kesenjangan desa oleh kota, maupun kesenjangan antar kelompok dimasyarakat. Proses perkembangan ekonomi perdesaan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pendekatan tersebut, meskipun demikian terdapat elemen-elemen dasar yang menjadi penentu ekonomi perdesaan dan sumberdaya alam sebagai primer-movernya dan menjadi pola dasar kehidupan masyarakat perdesaan.

Kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat pada dasarnya diakibatkan oleh faktor (1) sosial ekonomi rumah-tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah-tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam & lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global. Salah satu isu yang dihadapi dalam pembangunan pedesaan adalah penurunan kualitas hidup, ketersediaan sarana dan prasarana, ketidakmampuan institusi ekonomi menyediakan kesempatan usaha, lapangan kerja, serta pendapatan yang memadai, yang saling berkaitan dan sangat kompleks. Dengan demikian untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlunya peningkatan produktivitas yang sesuai dengan karakteristik perdesaan. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan wilayah perdesaan berkaitan dengan bidang usaha pertanian yang mendominasi pedesaan, dalam dua dekade terakhir ini terdapat perubahan struktur lapangan usaha di bidang pertanian, sehingga terjadi

kecenderungan penurunan di sektor pertanian, terutama dari segi lapangan usaha penduduk dan ketanagakerjaan. Dari kondisi ini maka akan membawa perubahan struktur di bidang sosial-ekonomi dan kelembagaan masyarakat perdesaan.

Hambatan dalam pengembangan ekonomi perdesaan tidak saja dihadapkan pada pergeseran dari pertanian ke non pertanian yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat perdesaan, tetapi juga modernisasi pola usaha tani secara terpadu serta pengembangan institusi ekonomi perdesaan yang belum sepenuhnya dibangun secara konsisten. Persoalan institusi ekonomi perdesaan bukan menjadi faktor satu-satunya, faktor modal juga menjadi kendala dalam mendukung pengembangan investasi perdesaan. Masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan adalah proses kemiskinan masyarakat perdesaan sebagai akibat kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung.

Beraneka ragam teori telah berupaya mencari penjelasan mengapa terjadi proses kemiskinan, secara garis besar, kemiskinan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan alamiah (Nasution, 1996). Kemiskinan struktural sering disebut sebagai kemiskinan buatan, baik langsung maupun tidak langsung kemiskinan kategori ini umumnya disebabkan oleh tatanan kelembagaan yang mencakup tidak hanya tatanan organisasi tetapi juga mencakup masalah aturan permainan yang diterapkan. Sedangkan kemiskinan alamiah lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Pada kondisi

sumberdaya manusia dan sumberdaya alam lemah/terbatas, peluang produksi relatif kecil atau tingkat efisiensi produksinya relatif rendah.

Beranjak dari kedua tipe kemiskinan itu, berbagai teori telah dikembangkan dalam upaya untuk memahami aspek-aspek yang menentukan terjadinya kemiskinan secara lebih mendalam. Keanekaragaman teori yang telah dikembangkan itu menggambarkan adanya perbedaan sudut pandang diantara pemerhati masalah kemiskinan. Secara umum teori-teori yang menjelaskan mengapa terjadi kemiskinan, dapat dibedakan menjadi teori yang berbasis pada pendekatan ekonomi dan teori yang berbasis pada pendekatan sosio -antropologi, khususnya tentang budaya masyarakat. Teori yang berbasis pada teori ekonomi antara lain melihat kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan kepemilikan faktor produksi, kegagalan kepemilikan, kebijakan yang bias ke perkotaan, perbedaan kualitas sumberdaya manusia, serta rendahnya pembentukan modal masyarakat atau rendahnya perangsang untuk penanaman modal. Disisi lain, pendekatan sosio –antropologis menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan (kemiskinan kultural). Di sisi lain terdapat pandangan proses pemiskinan sebagai akibat kebijakan yang bias perkotaan. Lipton dan Vyas (1981) mengajukan konsep ‘urban bias’ dalam menjelaskan mengapa terjadi kemiskinan di negara sedang berkembang.

Bias perkotaan ini dipercaya oleh Lipton, karena menurutnya memang terdapat antagonisme antara penduduk perdesaan dan perkotaan, dimana yang pertama ditandai dengan kemiskinan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pembangunan yang hanya diarahkan ke perkotaan akan

mengakibatkan semakin memburuknya kehidupan penduduk miskin di pedesaan. Untuk mengatasi kecenderungan yang negatif seperti itu, Lipton berpendapat bahwa negara sedang berkembang seharusnya mengarahkan kegiatan investasinya ke sumberdaya utama yang mereka miliki yakni pertanian yang padat karya (labour intensive). Dalam rangka dukungannya untuk mengurangi bias perkotaan, Lipton dan Vyas berpendapat bahwa sektor pedesaan adalah “pengguna investasi terbatas” yang lebih responsif dari pada sektor perkotaan. Sejauh ini gagasan Lipton tersebut telah mendapat banyak kritik namun juga dukungan di kalangan pemerhati masalah ekonomi pembangunan.

Menurut Lewis (dalam Suparlan, 1993), memandang kemiskinan dan cirri-cirinya sebagai suatu kebudayaan atau sebagai suatu sub kebudayaan dengan struktur dan hakikatnya yang tersendiri, yaitu sebagai suatu cara hidup yang diwarisi dari generasi ke generasi melalui garis keluarga.(Suparlan, 1993: 4–5). Pandangan ini menyatakan bahwa kebudayaan kemiskinan di negara-negara modern bukan hanya menyangkut masalah kelumpuhan ekonomi, masalah disorganisasi atau masalah kelangkaan sumber daya, melainkan di dalam beberapa hal juga bersifat positif karena memberikan jalan ke luar bagi kaum miskin untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Selanjutnya Lewis, mendefinisikan kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis, dan berciri kapitalisme.

Kebudayaan Kemiskinan tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dari kesadaran bahwa mustahil dapat meraih sukses di dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat yang lebih luas. Sekali kebudayaan tersebut tumbuh, ia cenderung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melalui pengaruhnya terhadap anak-anak. Kemiskinan menurut Suparlan (1993: 3), adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Kadir, (1993: 5) kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Hal ini disebabkan terbatasnya modal yang mereka miliki dan rendahnya pendapatan mereka. Sehingga akan mengakibatkan terbatasnya kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Mubyarto, (1990: 159) , golongan miskin adalah golongan yang rawan pangan yang berpengaruh negatif terhadap produktifitas kerja dan angka kematian balita. Menurut Salim (1984: 61), mendefinisikan golongan miskin adalah mereka yang berpendapatan rendah karena rendahnya produktifitas, di mana rendahnya tingkat produktifitas disebabkan oleh tidak memiliki asset produksi, lemah jasmani dan rohani.

Simanjuntak, .(1993), berpendapat bahwa kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan, perumahan, kesehatan dengan memadai. Menurut *World Health Organization, (world Bank,1995)*, kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang, di mana pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mendasar bagi kehidupannya. Kemiskinan juga dapat dikatakan timbul karena pendapatan yang rendah, namun demikian ada Negara yang pendapatan per kapitanya cukup tinggi akan tetapi tingkat kemiskinannya juga tinggi. Hal ini dimungkinkan karena distribusi pendapatannya kurang merata. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita suatu masyarakat, semakin kecil proporsi penduduk yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan. Namun perlu diingat bahwa di samping tergantung pada pendapatan perkapita, besarnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tergantung juga pada distribusi pendapatan. Semakin tidak merata distribusi pendapatan semakin besar pula penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau semakin tinggi persentase penduduk yang miskin. Distribusi pendapatan Indonesia tergolong kurang baik. Hal ini disebabkan distribusi pemilikan modal per provinsi yang kurang atau bahkan tidak merata.

Ciri – ciri kemiskinan pada umumnya dipaparkan sebagai berikut :
Salim (1984) memberikan ciri – ciri kemiskinan sebagai berikut : (1) mereka yang tidak mempunyai faktor produksi sendiri (seperti tanah, modal dan keterampilan) (2) tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki asset produksi dengan kekuatan sendiri (3) rata-rata pendidikan mereka rendah, (4) sebagian

besar mereka tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai buruh tani. yang tinggal di kota kebanyakan mereka yang berusia muda dan tidak memiliki keterampilan dan pendidikannya rendah.

Menurut Juoro, (1985), golongan miskin yang tinggal di kota ialah mereka yang hidup di suatu perekonomian yang biasa disebut *slum*. Mereka bukanlah gelandangan karena mempunyai pekerjaan, tempat tinggal, aturan hidup bermasyarakat dan memiliki aspirasi.

Menurut Tumanggor dalam Ismail (1999), cirri-ciri masyarakat yang berpenghasilan rendah / miskin adalah : (1) pekerjaan yang menjadi mata pencarian mereka umumnya merupakan pekerjaan yang menggunakan tenaga kasar. (2) nilai pendapatan mereka lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah jam kerja yang mereka gunakan, (3). nilai pendapatan yang mereka terima umumnya habis untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, (4). karena kemampuan dana yang sangat kurang, maka untuk rekreasi, pengobatan, biaya perumahan, penambahan jumlah pakaian semuanya itu hampir tidak dapat dipenuhi sama sekali.

Selain ciri-ciri kemiskinan seperti tersebut di atas, kemiskinan sering juga digolongkan dalam beberapa macam kemiskinan. Di antaranya adalah ke dalam dua macam kemiskinan yaitu; kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang perseorangan atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh Kebutuhan Dasar Minimum (KDM). Di sini tingkat pendapatan minimum akan merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau disebut sebagai Garis Kemiskinan.

Perkiraan Garis Kemiskinan dengan menggunakan konsep KDM ini merupakan suatu yang statis sifatnya. Perkembangan Garis Kemiskinan biasanya disesuaikan menurut indeks kemiskinan, di mana tingkat kehidupan penduduk miskin sama sekali tidak mengalami perubahan, sementara itu golongan penduduk yang lain tingkat kehidupannya telah meningkat. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja melainkan juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor lainnya.

Konsep kemiskinan relatif didasari kenyataan bahwa orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “ tidak miskin “. Sekalipun pendapatan telah mencapai tingkat kebutuhan minimum, namun apabila pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah daripada masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih dalam keadaan miskin.

Sementara itu menurut Azhari (1992), menggolongkan kemiskinan kedalam tiga macam kemiskinan yaitu : (1). Kemiskinan alamiah Kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber daya yang langka jumlahnya, atau karena perkembangan tingkat teknologi yang sangat rendah. Termasuk didalamnya adalah kemiskinan akibat jumlah penduduk yang melaju dengan pesat di tengah- tengah sumber daya alam yang tetap. (2). Kemiskinan structural, Kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial sedemikian rupa, sehingga masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Kemiskinan struktural ini terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas- fasilitas secara merata. Dengan perkataan lain kemiskinan ini tidak ada hubungannya dengan kelangkaan sumber daya alam. (3). Kemiskinan cultural, Kemiskinan yang muncul karena tuntutan tradisi / adat yang membebani ekonomi masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian atau pesta pesta adat lainnya. termasuk juga dalam hal ini sikap mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif serta kurang berorientasi kemasa depan.

A.8. Perdebatan tentang Konsep Inflasi

Boediono (1994), menjelaskan tiga teori inflasi sebagai berikut: 1) *Teori Kuantitas*. Teori kuantitas merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi. Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari (a) jumlah uang yang beredar, dan (b) psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (expectations). Inti dari teori ini adalah sebagai berikut: (a) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar (uang kartal atau uang giral). Penambahan jumlah uang ibarat “bahan bakar” bagi api inflasi. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab musabab awal terjadinya inflasi. (b) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan keadaan. *Keadaan pertama*, adalah bila masyarakat tidak atau belum mengharapkan harga-harga untuk naik pada

bulan-bulan mendatang. Dalam keadaan ini, sebagian besar dari penambahan jumlah uang yang beredar akan diterima oleh masyarakat untuk menambah likuiditasnya (memperbesar pos kas neraca anggota masyarakat). Ini berarti, sebagian besar dari penambahan jumlah uang tidak dibelanjakan untuk pembelian barang, berarti tidak akan ada kenaikan permintaan barang, yang berarti pula tidak akan ada kenaikan harga barang. Jika ada kenaikan harga, hanya relatif kecil. Misalnya, penambahan jumlah uang yang beredar sebesar 10%, hanya akan diikuti oleh kenaikan harga-harga sebesar 1%. Keadaan ini biasanya dijumpai pada waktu inflasi masih baru mulai dan masyarakat masih belum sadar bahwa inflasi sedang berlangsung. *Keadaan kedua*, adalah keadaan di mana masyarakat mulai sadar adanya inflasi. Masyarakat mulai mengharapkan adanya kenaikan harga. Penambahan jumlah uang yang beredar, tidak lagi untuk menambah pos Kas-nya, tetapi untuk membeli barang (memperbesar pos aktiva barang-barang di dalam neraca). Hal ini akan menyebabkan meningkatnya permintaan barang.

Akibat selanjutnya adalah kenaikan harga barang. Dalam hal ini, penambahan jumlah uang yang beredar 10%, akan diikuti kenaikan harga-harga sebesar 10% pula. Keadaan ini biasanya dijumpai pada waktu inflasi sudah berjalan cukup lama, dan masyarakat cukup waktu untuk menyesuaikan sikapnya terhadap situasi yang baru. *Keadaan ketiga*, adalah keadaan di mana inflasi telah terjadi lebih parah (hiperinflasi). Dalam keadaan ini masyarakat telah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata uang. Masyarakat cenderung enggan memegang uang kas. Begitu menerima uang kas, masyarakat cenderung langsung membelanjakannya. Masyarakat memiliki

harapan bahwa laju inflasi di bulan-bulan mendatang lebih besar dari laju bulan-bulan sebelumnya. Keadaan ini ditandai dengan makin cepatnya peredaran uang, dalam keadaan ini penambahan jumlah uang sebesar 10% misalnya, akan menyebabkan kenaikan harga-harga lebih besar dari 10%.

Teori Keynes. Teori ini menyatakan, bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan perekonomiannya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia sehingga timbul apa yang disebut dengan *inflationary gap* (celah inflasi).

Inflationary gap ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan keinginan mereka menjadi permintaan efektif akan barang-barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah keinginannya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Golongan masyarakat ini, mungkin adalah pemerintah sendiri yang menginginkan bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan melakukan defisit anggaran belanja yang ditutup dengan mencetak uang baru. Golongan ini mungkin juga pihak swasta yang ingin melakukan investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit bank. Golongan ini bisa juga dari serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji para anggotanya melebihi kenaikan produktivitas

kerja buruh. Apabila permintaan efektif dari golongan-golongan masyarakat tersebut, pada harga-harga yang berlaku, melebihi jumlah maksimum barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, maka inflationary gap akan timbul. Akibatnya, akan terjadi kenaikan harga-harga barang.

Dengan adanya kenaikan harga, sebagian dari rencana pembelian barang dari golongan-golongan tadi tentu tidak bisa terpenuhi. Pada periode berikutnya, golongan-golongan yang tidak bisa memenuhi rencana pembelian barang tadi, akan berusaha memperoleh dana lagi (baik dari pencetakan uang baru, kredit bank, atau kenaikan gaji). Tentunya tidak semua golongan tersebut berhasil memperoleh tambahan dana yang diinginkan. Golongan yang berhasil memperoleh tambahan dana lebih besar bisa memperoleh bagian dari output yang lebih banyak. Mereka yang tidak bisa memperoleh tambahan dana akan memperoleh bagian output yang lebih sedikit. Golongan yang kalah dalam perebutan ini adalah golongan yang berpenghasilan tetap atau yang penghasilannya tidak naik secepat kenaikan laju inflasi (pensiunan, PNS, petani, karyawan perusahaan yang tidak mempunyai serikat buruh). Inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan masyarakat. Inflasi akan berhenti jika permintaan efektif total tidak melebihi jumlah output yang tersedia.

Proses timbulnya inflationary gap, dapat diasumsikan bahwa semua golongan masyarakat bisa memperoleh dana , pada tingkat harga-harga yang berlaku, untuk membiayai rencana-rencana pembelian barang-barang. Misal, pemerintah memperbesar pengeluaran dengan mencetak uang baru. Dengan kenaikan harga ini, golongan masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi

permintaannya karena jumlah barang-barang yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan, sehingga yang terjadi hanya *realokasi* barang-barang yang tersedia dari golongan-golongan lain dalam masyarakat ke sektor pemerintah. Seandainya pada periode berikutnya, golongan masyarakat lain bisa memperoleh dana untuk membiayai rencana-rencana pembeliannya dengan harga yang baru.

Apabila golongan-golongan masyarakat tetap berusaha memperoleh jumlah barang yang sama dan mereka berhasil memperoleh dana untuk membiayai rencana-rencana pembelian tersebut pada tingkat harga yang berlaku, maka inflationary gap akan tetap timbul pada periode-periode selanjutnya. Dalam hal ini harga-harga akan terus naik. Inflasi akan berhenti hanya bila salah satu golongan masyarakat tidak lagi (atau tidak bisa lagi) memperoleh dana untuk membiayai rencana-rencana pembelian barang-barang pada harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi jumlah barang-barang yang tersedia.

Faktor-faktor jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan inflasi (yang berlangsung lama). Menurut teori ini ada dua ketegaran dalam perekonomian negaranegara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi, yaitu : (1) Ketegaran yang pertama berupa “ ketidakelastisan” dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan oleh : (a) Harga di pasar dunia dari barang-barang ekspor negara tersebut makin tidak menguntungkan (dibanding dengan harga-harga barang impor yang harus dibayar), atau sering disebut dengan istilah dasar penukaran (*term of trade*)

semakin memburuk. Dalam hal ini sering dianggap bahwa harga barang-barang hasil alam, yang merupakan barang-barang ekspor dari negara-negara sedang berkembang, dalam jangka panjang naik lebih lambat dari pada harga barang-barang industri, yang merupakan barang-barang impor negara-negara sedang berkembang, (b) Suplai atau produksi barang-barang ekspor tidak responsif terhadap kenaikan harga (tidak elastis). Kelambanan pertumbuhan ekspor berarti pula kelambanan kemampuan untuk impor barang-barang yang dibutuhkan (baik barang konsumsi maupun investasi). Akibatnya negara yang bersangkutan mengambil kebijakan pembangunan yang menekankan pada pengembangan produksi dalam negeri untuk barang-barang yang sebelumnya diimpor (*import-substitution strategy*) walaupun harus sering dengan biaya produksi yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih rendah.

Biaya yang lebih tinggi menyebabkan harga produk menjadi lebih tinggi. Dengan demikian inflasi akan terjadi. (2). Ketegaran kedua berkaitan dengan “ketidakelastisan” dari suplai atau produksi bahan makanan. Pertumbuhan bahan makanan tidak secepat pertumbuhan penduduk dan penghasilan per kapita, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri cenderung naik melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Akibat selanjutnya adalah timbulnya tuntutan dari para karyawan di sektor industri untuk memperoleh kenaikan gaji/upah. Kenaikan upah berarti kenaikan biaya produksi, yang berarti kenaikan harga barang-barang produksi. Kenaikan barang-barang, mengakibatkan tuntutan kenaikan upah lagi. Kenaikan upah akan diikuti oleh kenaikan harga produk. Dan seterusnya. Proses ini akan berhenti dengan sendirinya apabila harga bahan makanan tidak terus naik.

Dalam praktek, proses inflasi yang timbul karena dua ketegaran tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri. Kedua proses tersebut saling berkaitan dan bahkan saling memperkuat satu sama lain.

Disamping teori-teori tersebut, A.W. Phillips dari *London School of Economics* berhasil menemukan hubungan yang erat antara tingkat pengangguran dan tingkat perubahan upah nominal (Samuelson dan Nordhaus, 1997). Penemuan tersebut diperoleh dari hasil pengolahan data empirik perekonomian Inggris periode 1861- 1957 dan kemudian menghasilkan teori yang dikenal dengan Kurve Phillips. Cara menurunkan kurva phillips ini dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut: Kurva WP adalah kurva Phillips yang merupakan garis regresi dari hubungan antara persentase perubahan tingkat upah nominal dan tingkat pengangguran. Setiap titik dalam gambar tersebut menunjukkan kombinasi nilai persentase perubahan tingkat upah nominal dan persentase tingkat pengangguran pada tahun yang bersangkutan, semua titik tersebut membentuk diagram pencar, dari diagram pencar ini ditarik garis regresi, dan jelas bahwa antara persentase perubahan tingkat upah nominal dan persentase pengangguran mempunyai hubungan yang negatif. Artinya, meningkatnya tingkat upah nominal akan disertai oleh menurunnya tingkat pengangguran. Sebaliknya menurunnya tingkat upah nominal akan disertai meningkatnya tingkat pengangguran.

B. Penelitian Terdahulu,

Yusnita Heni (2008), dalam penelitiannya analisis belanja daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan, dengan menggunakan metode analisis data time series melalui pendekatan kuantitatif dengan metode SEM (*Structural Equation Modeling*) dan hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) berhubungan negative dan signifikan, dimana hasil estimasi yang diperoleh adalah apabila belanja daerah naik 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan turun 0,45 persen.

Pramono Hariady (2008), dalam penelitiannya dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dengan menggunakan metode analisis data panel melalui pendekatan kuantitatif dengan metode regresi dan hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah hanya mampu menjelaskan variasi nilai variabel tak bebas pertumbuhan ekonomi sebesar 18,12 persen variabel tidak bebas, sedangkan 81,88 persen dijelaskan oleh variabel lain.

Made Antara (2006), dalam penelitiannya dampak pengeluaran pemerintah dan Wisatawan terhadap kinerja perekonomian Bali, dengan menggunakan metode SAM (Social accounting matrix) dan hasilnya kinerja perekonomian Bali mengalami peningkatan.

Mahyuddin (2009) dalam penelitiannya korelasi belanja publik dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, dengan menggunakan metode

VAR (*vector auto regression*) dan hasilnya kinerja keuangan publik berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Anton Hendranata (2006), dalam penelitiannya dampak alokasi pengeluaran pembangunan terhadap perekonomian Indonesia, dengan menggunakan metode OLS (*ordinary least square*) dan hasilnya alokasi anggaran pembangunan berdampak positif tapi tidak signifikan terhadap perekonomian.

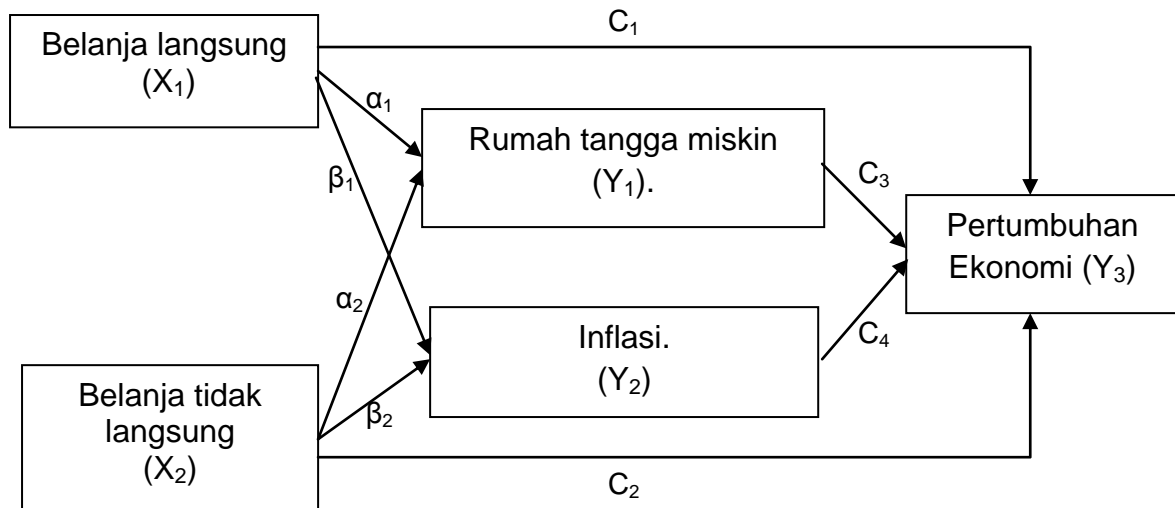
Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Mustopadidjaya (dalam Larasati, 2006) sedangkan disisi lain peneliti terdahulu menemukan bahwa pengeluaran pembangunan tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu pada penelitian ini penulis mencoba memasukkan variabel rumah tangga miskin dan tingkat inflasi, dari dimensi pengeluaran yang relevan untuk dikaji pada penelitian ini adalah tingkat efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mencapai pertumbuhannya adalah apakah ada pengaruh rumah tangga miskin dan inflasi, pengeluaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka, beberapa hal dapat dilakukan sebagai dasar bagi peneliti dalam membantu melakukan pengkajian mengenai kebijakan pemerintah khususnya pengeluaran pemerintah dengan ruang lingkup pemerintah daerah. Bahwa sebagaimana dalam konteks negara, peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat dihadapi oleh pasar yaitu dalam hal penyediaan barang-barang publik. Pemerintah daerah dituntut dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna tercapainya pendapatan perkapita masyarakat. Pendekatan dan upaya peningkatan pertumbuhan bukanlah semata-mata menentukan pertumbuhan sebagai satu-satunya tujuan pembangunan daerah, namun pertumbuhan merupakan salah satu ciri pokok terjadinya proses pembangunan. Peran pemerintah daerah dapat dijalankan secara efisien dan efektif melalui salah satu instrument kebijakan yaitu pembelanjaan (belanja tidak langsung dan belanja langsung) dimana pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka kajian dalam penelitian yang mengambil kasus di Kota Jayapura dengan variabel-variabel independen belanja langsung (X_1), belanja tidak langsung (X_2), dan variabel dependen rumah tangga miskin (Y_1), inflasi (Y_2) serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) di Kota Jayapura. Alur pemikiran dalam penelitian ini digambarkan seperti pada gambar 1

Gambar 1
 Kerangka Pikir Pengaruh variabel dependen
 terhadap Pertumbuhan Ekonomi
 melalui rumah tangga miskin, inflasi.



D. Hipotesis

Pengaruh belanja tidak langsung dan belanja langsung pemerintah daerah melalui variabel dependen maupun independen terhadap pertumbuhan ekonomi akan cenderung tidak stabil apabila tidak memperhitungkan faktor efisiensi dan efektivitas, maka peran pemerintah sangat berpengaruh dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dengan terciptanya lapangan kerja baru dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut, anggaran belanja langsung digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi guna mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan perkapita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis berkaitan dengan penelitian pengaruh rumah tangga miskin, inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

1. Diduga bahwa belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rumah tangga miskin dan inflasi.
2. Diduga bahwa belanja langsung berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap rumah tangga miskin.
3. Diduga bahwa belanja tidak langsung berpengaruh positif tidak signifikan terhadap inflasi.
4. Diduga bahwa belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rumah tangga miskin dan inflasi.
5. Diduga bahwa pengaruh rumah tangga miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Jayapura.
6. Diduga bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Jayapura.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Jayapura Provinsi Papua, dan waktu pelaksanaan penelitian selama 6 (enam) bulan.

B. Jenis dan Sumber Data

B.1. Penelitian dilakukan di Kota Jayapura dengan menggunakan data sekunder runtut waktu (*time series*) tahunan dari tahun 2001 – 2010 yang ditunjang dengan studi kepustakaan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah,
- b) Produk Domestik Regional Bruto,
- c) Jumlah rumah tangga miskin,
- d) Laju inflasi

B.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa instansi antara lain :

- a) Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura.
- b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura.
- c) Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura
- d) Instansi-instansi terkait lainnya.

C. Metode Analisis Data

Pembahasan mengenai pengeluaran pemerintah daerah Kota Jayapura, menggunakan metode analisis sebagai berikut :

- a) Alat analisis yang dilakukan terhadap pengeluaran daerah khususnya penerimaan daerah dengan pengeluaran menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan rasio antara realisasi belanja daerah dengan penerimaan daerah dikali seratus yang dinyatakan dalam persentase dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Daerah}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat dilakukan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kinerja pemerintah daerah dalam mengelolah keuangannya dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

- b) Analisis efektivitas pengeluaran pemerintah daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikali dengan seratus dalam bentuk persen dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Sumber : Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, 2007.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal satu atau 100 persen, dengan demikian semakin

besar rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik. (Halim, 2008)

c) Pengaruh variabel X_1 , X_2 , terhadap (Y_3) pertumbuhan ekonomi.

Untuk memenuhi tujuan penelitian serta menguji hipotesis yang telah ditetapkan maka analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode *Structural Equation Modeling* (SEM). Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang dapat diunggulkan yaitu secara teknis sangat akurat, mudah dalam menginterpretasikan perhitungannya serta sebagai alat estimasi linier maupun non-linier (Sofyan, 2009). Regresi dilakukan terhadap model persamaan regresi yang diturunkan adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = f(X_1, X_2)$$

$$Y_2 = f(X_1, X_2)$$

$$Y_3 = f(X_1, X_2, Y_1, Y_2)$$

Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan penelitian ini diasumsikan bahwa Y adalah pertumbuhan ekonomi yang merupakan variabel independen, sedangkan X adalah variabel dependen yang terdiri dari belanja langsung (X_1), belanja tidak langsung (X_2), dan Sedangkan model yang digunakan dengan modifikasi dalam bentuk *Structural Equation Modeling* (SEM) sebagai berikut :

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \mu_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu_2 \dots\dots\dots(2)$$

$$Y_3 = C_0 + C_1 X_1 + C_2 X_2 + C_3 Y_1 + C_4 Y_2 + \mu_3 \dots\dots\dots(3)$$

$$Y_3 = C_0 + C_1X_1 + C_2X_2 + C_3 (\alpha_0 + \alpha_1X_1 + \alpha_2X_2 + \mu_1) + C_4 (\beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2) + \mu_2$$

$$Y_3 = (C_0 + C_3\alpha_0 + C_4\beta_0) + (C_1 + C_3\alpha_1 + C_4\beta_1) X_1 + (C_2 + C_3\alpha_2 + C_4\beta_2) X_2 + C_3 \mu_1 + \mu_2$$

dimana : $C_0 + C_3\alpha_0 + C_4\beta_0 = \gamma_0$

$$C_1 + C_3\alpha_1 + C_4\beta_1 = \gamma_1$$

$$C_2 + C_3\alpha_2 + C_4\beta_2 = \gamma_2$$

$$C_3 \mu_1 + \mu_2 = \mu_{1,2}$$

Sehingga persamaan menjadi

$$Y_3 = \gamma_0 + \gamma_1X_1 + \gamma_2X_2 + \mu_{1,2} \dots\dots\dots(4)$$

Untuk melihat bagaimana model menunjukkan bagaimana pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung serta pengaruh total variabel dependen terhadap variabel independen adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Pengaruh Langsung, tidak Langsung dan Pengaruh Total

Model	Langsung	Tdk Langsung	Total
$L_n X_1 \rightarrow L_n Y_1$	α_1	-	α_1
$\rightarrow L_n Y_2$	β_1	-	β_1
$\rightarrow Y_3$	C_1	$C_3 \alpha_1 + C_4 \beta_1$	$C_1 + C_3 \alpha_1 + C_4 \beta_1$

$X_2 \rightarrow L_n Y_1$	α_2	-	α_2
$\rightarrow L_n Y_2$	β_2	-	β_2
$\rightarrow Y_3$	C_2	$C_3\alpha_2 + C_4\beta_2$	$C_2 + C_3\alpha_2 + C_4\beta_2$
$L_n Y_1 \rightarrow Y_3$	C_3	-	C_3
$L_n Y_2 \rightarrow Y_3$	C_4	-	C_4

D. Defenisi Operasional

1. Pertumbuhan Ekonomi adalah rasio produk domestik regional bruto berdasarkan harga konstan dari tahun ke tahun dengan membandingkan ratio tahun akhir dikurang tahun sebelumnya dibagi dengan tahun sebelumnya kali seratus persen.
2. Inflasi adalah pertambahan ouput tidak diimbangi dengan jumlah uang beredar yang menyebabkan banyak harga-harga meningkat yang pengukurannya menggunakan indicator perhitungan berdasarkan indeks harga konsumen yang membandingkan indeks harga tahun sekarang dikurangi indeks harga tahun sebelumnya dibagi indeks harga tahun sekarang dikali seratus persen.
3. Rumah tangga miskin adalah rumah tangga tangga yang masuk dalam kategori tidak mampu yang daya belinya terhadap kebutuhan pokok sangat rendah dan pendataannya dilakukan oleh pemerintah kota Jayapura setiap tahunnya.
4. Belanja tidak langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan belanja yang digunakan untuk membiayai kebutuhan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang dihitung dalam satuan rupiah.

5. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan, terdiri; Belanja pegawai, belanja barang dan jasa dalam yang dihitung dengan satuan rupiah
6. Efisiensi adalah menggambarkan besarnya rasio belanja daerah dengan anggaran daerah.
7. Efektivitas adalah perbandingan antara rasio anggaran dan pencapaian realisasi anggaran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. SEJARAH SINGKAT KOTA JAYAPURA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 yang materinya disimpulkan dari hasil seminar hari jadi Kota Jayapura serta beberapa tulisan tokoh yang memaparkan sejarah Kota Jayapura, mulai dari masuknya bangsa Eropa dengan segala kebudayaan sampai kepada pemberian nama Kota Jayapura yang dilakukan sebagai berikut:

Penduduk asli daerah ini adalah Kayu Batu, Kayu Pulo, Tobati, Enggros, Nafri dan Skow. Sebelum kontak dan pengaruh luar menyentuh penduduk tersebut, suasana kehidupan berkonotasi otonom, rukun, tenang, damai dan bebas. Tetapi setelah terjadi kontak dan pengaruh dari luar, maka mulai terjadi gesekan dan perubahan. Gesekan dan perubahan yang terjadi antara lain dengan datangnya bangsa Portugis, yang dikenal dengan perjalanan Colombus, Bartolomeus Diaz, Vasco dan Gama, Marcopolo dan lain-lain yang membuat orang Eropa demam mengadakan penemuan-penemuan baru (New Word) dengan tujuan mengangkat kekayaan Timur jauh seperti rempah-rempah. Era pelayaran ini telah membawa orang-orang Portugis sampai ke Indonesia umumnya dan Irian pada khususnya. Orang-orang Spanyol pun pernah mengarungi samudera dan tida di tanah Indonesia khususnya di tanah Irian.

Sejarah arung samudera telah mencatat secara baik orang-orang yang berbangsa Spanyol yang pernah tiba di sekitar muara sungai Mamberamo, antara lain YNICO ORTIS DE FRETES 16 Juni 1945, ALVARO MEMDANA DE NEYRA (1567), ANATOMIO MARTA (1591-1593) dan lain-lain.

Sejarah juga mencatat bahwa, pada tanggal 13 Agustus 1968 seorang pelaut berkebangsaan Perancis yang bernama L.A. BOUGAINVELLE yang pernah berlabuh di teluk Yos Sudarso dan member nama gunung Dafonsoro dengan nama Ciclop yang adalah nama seorang raksasa bermata satu dan seram rupanya (bahasa: Yunani/Gerika) yang terdapat didalam mitos Yunani. Dia juga member nama sebuah gunung dengan namanya sendiri BOUGAINVELLE di sebelah timur Jayapura, tepatnya di desa Skouw.

Tanggal 28 Agustus 1909 sebuah kapal dengan nama "EDI" merapat di teluk Numbay atau Yos Sudarso dengan membawa satu detasemen tentara Belanda dibawah komando Kapten Infanteri F.J.P. SACHESE. Mereka adalah orang-orang Belanda penghuni pertama yang terdiri dari 4 perwira, 60 anggota tentara, 60 pemikul, beberapa pembantu dan istri-istri para angkatan bersenjata, sehingga total keseluruhan jumlah mereka 290 orang, mereka mendirikan kampamen yang terdiri dari teda-tenda dan segera mendirikan perumahan dari bahan sekitar tempat itu.

Akhirnya, pada tanggal 7 Maret 1910 SACHESE menamai tempat itu "HOLLANDIA", Hollandia dapat diartikan sebagai "HOL" artinya Lengkung, Teluk dan "LAND" artinya Tanah, Tempat. Jadi Hollandia berarti Tanah yang melengkung atau tempat yang berteluk, alasan mengapa SACHESE menamai

tempat itu HOLLANDIA, karena geografis Negeri Belanda (Holland atau Nederland) menunjukkan keadaan yang berteluk-teluk, geografis kota Jayapura hampir sama dengan garis pantai utara negeri Belanda.

Nama Hollandia diatas nama asli BAU O BWAI (Bahasa Kayu Pulo) atau yang populer dengan nama Numbay. Numbay telah diganti namanya sebanyak 4 kali, yaitu Hollandia, Kota Baru, Sukarnopura dan Jayapura, tepatnya tanggal 1 Maret 1963 Irian Jaya definitif kembali ke Indonesia dan sejak tanggal 1 Mei 1963 sampai tahun 1999 banyak sekali kemajuan dan perubahan yang terjadi di Irian Jaya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26/1997 tanggal 28 Agustus 1997 tentang pembentukan Kota Administratif Jayapura, maka pada hari Jumat 14 September 1997, Kota Jayapura diresmikan sebagai Kota Administratif oleh Bapak H. Amir Machmud, selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Jadilah Kota alternatif pertama di Irian Jaya dan ke 12 di Indonesia.

Kota dengan 4 distrik antara lain distrik Jayapura Utara, distrik Jayapura Selatan, distrik Abepura dan distrik Muara Tami berpenduduk kurang lebih 3.153.981 jiwa pada tahun 2010 dengan populasi yang terdiri dari orang asli Papua dan pendatang dari luar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Ambon, Kay, Madura, Sunda, saat ini menjadi sasaran dari kedatangan migran dari luar kota Jayapura maupun dari luar Papua karena merupakan pusat pertumbuhan ekonomi sehingga memberikan banyak kesempatan kerja maupun karena kelengkapan fasilitas pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi semacam ini di satu sisi

merupakan hal positif bagi pengembangan dan pembangunan kota Jayapura ke depan tetapi di saat yang sama jika tidak adanya pengaturan secara baik maka justru dengan mudah menjadi potensi gejolak yang berujung konflik. Sebagai contoh dominasi pendatang dari luar di bidang pemerintahan dan ekonomi (pasar) di kota Jayapura terkadang menjadi pemicu terjadinya konflik antara masyarakat asli Jayapura (Port Numbay) dengan kelompok migran tertentu, ditambah lagi kehadiran UU No. 21 tahun 2001 dengan semangat Papuanisasi yang kental dan terkadang diartikan secara sempit semakin memperbesar potensi terjadinya konflik sosial jika tidak diantisipasi dengan kebijakan – kebijakan yang benar – benar adil sebab bagaimanapun juga semua penduduk kota Jayapura berhak untuk mendapatkan pelayanan sosial yang sama dari pemerintah kota Jayapura walaupun nantinya ada sedikit pengecualian untuk penduduk asli Port Numbay/kota Jayapura.

A.1. LETAK GEOGRAFIS, BATAS DAN LUAS WILAYAH KOTA JAYAPURA

Kota Jayapura terletak di bagian utara Provinsi Papua yang secara geografis berada pada $1^{\circ} 27' - 3^{\circ} 49'$ lintang selatan dan $137^{\circ} 27' - 141^{\circ} 41'$ bujur timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan samudera pasifik
2. Sebelah selatan berbatasan dengan distrik Arso Kabupaten Keerom
3. Sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea
4. Sebelah barat berbatasan dengan distrik Depapre Kabupaten Jayapura.

Kota Jayapura yang berdiri sejak tanggal 21 September 1993 berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993, memiliki luas wilayah 940 km² atau 92.000 Ha, yang terbagi dalam 4 distrik yaitu Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, dan Muara Tami.

Berdasarkan luas wilayah diatas, maka jarak terjauh dari barat ke timur ± 29 km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat luas wilayah Kota Jayapura yang dirinci menurut status pemerintahan, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Nama Kampung/Kelurahan dan Status Pemerintahan Wilayah
Kota Jayapura

No	Distrik	Status Pemerintahan	
		Kampung	Kelurahan
1.	Jayapura Utara	Kayu Batu	1. Gurabesi 2. Bayangkara 3. Mandala 4. Trikora 5. Angkasapura 6. Imbi 7. Tanjung Ria
2.	Jayapura Selatan	1. Tobati 2. Tahima Soroma	1. Entrop 2. Hamadi 3. Ardipura 4. Numbay 5. Argapura
3.	Abepura	1. Nafri 2. Enggros 3. Koya Koso	1. Asano 2. Awiyo 3. Yobe 4. Abepantai 5. Kota Baru 6. Vim 7. Wai Mhorock 8. Wahno
4.	Heram	1. Yoka 2. Kampung Waena	1. Hedam 2. Waena 3. Yabansai
5.	Muara Tami	1. Holtekam 2. Skouw Yambe 3. Skouw Mabo 4. Skouw Sae 5. Kampung Mosso	1. Koya Barat 2. Koya Timur

Sumber : BPS Kota Jayapura, 2011

A.2. TOPOGRAFI

Kota Jayapura memiliki keadaan alam yang terdiri dari daratan dan lautan, yang topografi daerah cukup bervariasi, mulai daratan tinggi yang memiliki ketinggian 15 meter dari permukaan laut hingga daratan rendah/landai yang berada pada pesisir pantai dengan jarak dari tepi pantai 50 - 100 meter dengan rata-rata kemiringan 0-15° dan berbukit/gunung 700 meter di atas permukaan laut. Kota Jayapura dengan luas wilayah 940.000 Ha terdapat ± 30% tidak layak huni, karena terdiri dari perbukitan yang terjal, rawa-rawa dan 40 % bersifat konservasi dan hutan lindung.

A.3. IKLIM DAN MUSIM

Tekanan udara dan suhu sangat mempengaruhi keadaan iklim Kota Jayapura, dimana suhu udara rata-rata berkisar dari 29°C-31,8°C dengan curah hujan rata-rata 146 mm / tahun dan kelembaban udara 80,42 %. Kota Jayapura tergolong beriklim dan tidak tergantung pada musim, yang disebabkan karena system ekuatornya tidak jelas. Oleh sebab itu, curah hujan dapat terjadi setiap bulan dalam setahun dengan hari hujan yang berbeda. Variasi hujan antara 45-255 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata bervariasi antara 148-175 hari hujan/tahun. Suhu rata-rata 29°C-31,8°C, musim hujan dan kemarau tidak teratur. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 79%-81% di lingkungan perkotaan sampai di pinggiran kota, iklim seperti ini sangat menunjang bidang pertanian dan peternakan.

A.4. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Kota Jayapura dengan luas wilayah 940.000 Ha didominasi oleh kawasan terbuka berupa hutan sekunder sampai primer. Secara terperinci pemanfaatan lahan di Kota Jayapura yang dikelompokkan dalam kawasan berdasarkan fungsinya (kawasan lindung dan kawasan budidaya) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Luas Kota Jayapura dirinci
Menurut Pemanfaatan Kawasan

Pemanfaatan Kawasan	Penggunaan Lahan	Luas	%
		Area (Ha)	
Kawasan Budaya	Permukiman	8,537.82	9.08
	Wilayah Produksi	3,082.00	3.28
	Alang-alang	1,875.00	1.99
	Rawa/Pasang Surut	75.00	0.08
	Danau	650.00	0.69
Jumlah Kawasan Budidaya		14,219.82	15.13
Kawasan Lindung	Hutan yang belum difungsikan	68,891.20	73.29
	Hutang Lindung Abepura Cagar	2,246.00	2.39
	Alam Pegunungan Cyclop	2,211.20	2.35
	Taman Wisata Teluka Yotefa	6,431.78	6.84
Jumlah Kawasan Lindung		79,780.18	84.87
Total		94,000.00	100.00

Sumber : BPS Kota Jayapura, 2011

A.5. PENDUDUK DAN KEPADATANNYA

Penduduk merupakan unsure penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian. Berdasarkan registrasi penduduk Kota Jayapura selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dimana jumlah penduduk tersebut terbesar dalam lima distrik. Selama tahun 2009, jumlah penduduk Kota Jayapura terbesar di distrik Jayapura Selatan dengan jumlah 62.901 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 1.449 jiwa. Kemudian diikuti distrik-distrik lain yang berada di wilayah Kota Jayapura menurut distrik tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk Kota Jayapura
Berdasarkan Distrik Tahun 2010

No	Distrik	Luas Wilayah KM ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Orang/Km ²)
1.	Jayapura Utara	51	64.979	1.274
2.	Jayapura Selatan	43,4	62.901	1.449
3.	Abepura	155,7	62.905	404
4.	Heram	63,2	34.701	549
5	Muara Tami	626,7	109.970	18
Jumlah		940	236.456	252

Sumber : BPS Kota Jayapura, 2011

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa, jumlah penduduk disetiap distrik mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

dilihat dari luas wilayah maka Distrik Muara Tami yang paling luas yakni 626,7 km², kemudian distrik Abepura dengan luas wilayah 155,7 km², distrik Heram dengan luas wilayah 63,2 km², selanjutnya distrik Jayapura Utara dengan luas wilayah 51 km², dan distrik yang paling kecil adalah distrik Jayapura Selatan dengan luas wilayah 43,4 km². Kota Jayapura dihuni oleh penduduk heterogen baik dilihat strata sosial, budaya, etnis maupun agama. Hampir semua suku di Indonesia berada di Kota Jayapura, berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2010, diketahui bahwa penduduk Kota Jayapura berjumlah 236.456 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 125.473 jiwa dan perempuan 110.983 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki menempati porsi terbesar jika dibandingkan dengan penduduk perempuan.

B. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Peningkatan perekonomian nasional pada triwulan I tahun 2010 terus menunjukkan peningkatan yang semakin membaik, perbaikan tersebut ditopang oleh meningkatnya optimisme masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi domestik serta terjaganya kestabilan makro ekonomi nasional, di tengah pemulihan ekonomi pasca krisis global dimana sektor perbankan tetap sehat dan stabil, ekspektasi pemulihan ekonomi yang semakin optimis serta respon kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif dalam mendukung terjaganya perekonomian domestik, sejalan dengan hal tersebut kinerja pasar keuangan global semakin membaik.

B.1. Perkembangan APBD Kota Jayapura

Realisasi pendapatan daerah selama tahun anggaran 2001 – 2010, menunjukkan perkembangan persentase realisasi rata-rata 18,28 persen per tahun artinya tingkat perkembangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Jayapura selalu mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat kecuali ada penurunan pada tahun 2008 yakni sebesar 18,59 persen, dan perubahan terbesar terjadi pada tahun 2002 yakni sebesar 61,95 persen, seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Perkembangan APBD Kota Jayapura
Tahun 2001 – 2010

No	Tahun	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Perkembangan
1	2001	137,661,494,995	141,444,104,717	-
2	2002	225,439,473,045	229,067,117,332	61.95
3	2003	268,240,571,400	233,418,946,623	1.90
4	2004	268,942,292,000	269,866,608,776	15.61
5	2005	286,801,186,000	303,268,910,826	12.38
6	2006	422,904,700,000	442,315,220,617	45.85
7	2007	665,977,127,000	672,372,371,987	52.01
8	2008	515,741,923,500	547,378,487,459	-18.59
9	2009	572,358,995,570	584,712,575,170	6.82
10	2010	611,109,904,420	613,082,989,143	4.85

Sumber : BPKAD Kota Jayapura, 2011

Berdasarkan tabel 4.4 maka dapat diketahui bahwa tidak ada perkembangan realisasi anggaran pemerintah dari tahun 2007 ke 2008 sebesar karena -18,59 persen, yang artinya bahwa tidak ada pertumbuhan, sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2001 ke 2002 sebesar 61,95 persen, artinya realisasi perkembangan yang tertinggi selama 10 tahun terakhir.

B.2. Perkembangan Belanja Daerah Kota Jayapura.

Belanja daerah Kota Jayapura selama tahun 2001 – 2010 dimana jumlah yang dianggarkan dan direalisasikan adalah seperti pada tabel berikut, dimana perkembangan belanja daerah kota Jayapura selama tahun anggaran 2001 sampai tahun 2010 menunjukkan perkembangan yang baik dimana perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2002 yakni sebesar 61,95 persen, dan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2004 yang mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar -7,01 persen artinya terjadi penurunan jumlah belanja dibandingkan dengan tahun 2007, sedangkan tahun 2010 kembali mengalami kenaikan tapi hanya sebesar 0,24 persen.

Tabel 4.5

**Perkembangan Belanja Pemerintah Kota Jayapura
Tahun 2001 – 2010**

NO	Tahun	Belanja Langsung	Belanja tidak Langsung	Jumlah Belanja	Perkemb
1	2001	90,429,927,613	45,052,844,059	135,482,771,672	-
2	2002	131,451,928,164	89,088,495,823	220,540,423,987	62.78
3	2003	184,173,315,790	76,557,415,322	260,730,731,112	18.22
4	2004	187,474,444,145	54,981,231,809	242,455,675,954	(7.01)
5	2005	192,213,568,538	54,714,971,316	246,928,539,854	1.84
6	2006	207,196,354,607	170,513,375,942	377,709,730,549	52.96
7	2007	323,325,647,232	126,529,018,995	449,854,666,227	19.10
8	2008	352,751,686,554	170,378,090,668	523,129,777,222	16.29
9	2009	411,525,267,679	208,063,017,741	619,588,285,420	18.44
10	2010	449,257,621,667	171,834,899,600	621,092,521,267	0.24

Sumber : BPKAD Kota Jayapura, 2011

Berdasarkan tabel 4,5 bahwa baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung terus mengalami perkembangan, dimana perkembangan tertinggi pada tahun 2002 sebesar 62,78 persen dan tahun 2006 sebesar 52,96 persen, sedangkan tahun 2004 mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 7,01 persen, dan tahun 2010 mengalami kenaikan tapi sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,24 persen.

B.3. Perkembangan PDRB Kota Jayapura

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di kota Jayapura mencerminkan keseluruhan output yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi yang tujuan utamanya adalah untuk menilai aktivitas perekonomian serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti pada tabel 4.6 :

Tabel 4.6
Perkembangan PDRB Kota Jayapura
Tahun 2001-2010.

Tahun	PDRB			
	Harga Berlaku	Perkembangan %	Harga Konstan	Perkembangan %
2001	1,330,200.68	-	1,253,444.92	-
2002	1,592,736.78	19.74	1,333,477.04	6.38
2003	1,875,704.07	17.77	1,445,952.77	8.43
2004	2,234,691.08	19.14	1,578,263.94	9.15
2005	2,637,997.42	18.05	1,713,480.92	8.57
2006	3,249,658.36	23.19	1,932,147.38	12.76
2007	4,014,275.97	23.53	2,186,551.52	13.17
2008	4,826,485.93	20.23	2,408,909.63	10.17
2009	5,446,988.54	12.86	3,010,424.02	24.97
2010	5,995,253.40	10.07	3,569,670.60	18.58

Sumber : BPS, Kota Jayapura, 2011.

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa PRDB kota Jayapura dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, baik harga berlaku maupun harga konstan selalu mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan, dimana perkembangan tertinggi pada harga berlaku pada tahun 2007 sebesar 23,53 persen dan terendah sebesar 10,07 persen pada tahun 2010, dan pada harga konstan perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2009 yakni sebesar 24,97 persen dan terendah pada tahun 2002 yakni sebesar 6,38 persen.

B.4. Keadaan Penduduk dan Rumah Tangga Miskin.

Terkait dengan kemiskinan, isu penting yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah kota Jayapura adalah masih relatif banyaknya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk yang relatif banyak ini terutama dikaitkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengentasannya,

baik melalui pendanaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, namun demikian, upaya yang sedemikian tinggi kuantitasnya tersebut belum secara signifikan dapat mengentaskan kemiskinan. Terlihat dari masih banyaknya jumlah penduduk miskin, seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Keadaan Rumah Tangga Miskin

Tahun	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga Miskin	%
2001	165,126	24,012	14.54
2002	192,595	23,987	12.45
2003	224,633	23,875	10.63
2004	213,402	23,235	10.89
2005	149,026	23,172	15.55
2006	156,870	23,061	14.70
2007	173,817	22,900	13.17
2008	182,965	22,208	12.14
2009	202,731	22,010	10.86
2010	236,456	21,860	9.24

Sumber : BPS, Kota Jayapura, 2011

Berdasarkan tabel 4.7 bahwa keadaan rumah tangga miskin berfluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2001 – 2004 sudah menunjukkan adanya penurunan, tetapi pada tahun 2005 terjadi peningkatan yang signifikan, jika dirata-ratakan maka ada sekitar 12,42 persen rumah tangga miskin dari jumlah penduduk yang ada di kota Jayapura setiap tahunnya. Disamping itu juga penambahan penduduk kota Jayapura tidak

menentu, ini disebabkan karena banyaknya mobilisasi penduduk yang keluar masuk.

C. Hasil Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis berdasarkan model struktural dalam kerangka pikir dengan menggunakan runtut waktu dari tahun 2001 – 2010 dengan menggunakan program AMOS 18 dengan model *Structural Equation Modeling* (SEM), dengan output seperti pada lampiran 1.

Nilai statistik yang digunakan dalam pembahasan ini adalah *unstandardized regression weights* yang bertujuan untuk menjelaskan berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, berdasarkan model persamaan structural yang sudah fit dimana nilai chi-square telah mencapai minimum, comparative fit index (CFI) dan incremental fit index (IFI) dimana keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu lima, pengujian dilakukan secara parsial dengan nilai critical ratio (CR) atau Probability (p) pada regression weights untuk melihat signifikansi dari hasil estimasi yang diperoleh.

Setelah dilakukan estimasi pada model persamaan structural dengan menggunakan program AMOS didapatkan hasil estimasi nilai-nilai intercept atau konstanta dari masing-masing variabel terikat, belanja tidak langsung, belanja langsung dan pertumbuhan ekonomi.

C.1. Pengaruh Langsung (Direct Effect)

Hasil estimasi nilai regresi hubungan fungsional antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam analisis SEM masing-masing dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.8
Hasil estimasi pengaruh langsung antara variabel
(model SEM)

Hubungan Fungsional		Parameter	CR	p
Var bebas	Var terikat	Koefisien		
Belanja Langsung (X_1)	1. Rumah Tangga Miskin (Y_1)	-0,042	-5.872	0,000
	2. Inflasi (Y_2)	0,912	1.387	0,165
	3. Pertumbuhan Ekonomi (Y_3)	0.257	1.885	0,059
Belanja tidak langsung (X_2)	1. Rumah Tangga Miskin (Y_1)	-0,020	-3.724	0,000
	2. Inflasi (Y_2)	-3,696	-7.419	0,000
	3. Pertumbuhan Ekonomi (Y_3)	0,392	4.425	0,004
Rumah Tangga Miskin (Y_1)	Pertumbuhan Ekonomi (Y_3)	-2,887	-1.024	0,306
Inflasi (Y_2)	Pertumbuhan Ekonomi (Y_3)	0.044	1.425	0.154

Sumber ; lampiran 2, data diolah tahun 2001-2010

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa, apabila belanja langsung (X_1), meningkat sebesar 1 persen akan berpengaruh terhadap penurunan jumlah rumah tangga miskin (Y_1) sebesar 0,042 persen dengan $\alpha = 0,000$ atau dibawah 0,05 yang artinya pengaruh belanja langsung terhadap rumah tangga miskin (Y_1) signifikan.

Pengaruh variabel belanja langsung (X_1), terhadap inflasi (Y_2), berpengaruh positif tidak signifikan terhadap inflasi (Y_2) dengan $\alpha = 0,165$ atau lebih besar dari 0,05 yang artinya pengaruh belanja langsung terhadap inflasi (Y_2) tidak signifikan, karena walaupun ada kenaikan belanja langsung yang implikasinya ada penambahan jumlah uang beredar tetapi tidak berpengaruh terhadap inflasi.

Pengaruh variabel belanja langsung (X_1), terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3), berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) dengan $\alpha = 0,05$ atau sama dengan $0,05$ yang artinya pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) signifikan.

Pengaruh variabel belanja tidak langsung (X_2) terhadap rumah tangga miskin (Y_1), berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rumah tangga miskin (Y_1) dengan tingkat signifikansi $0,000$ atau dibawah $0,05$ yang artinya pengaruh belanja tidak langsung (X_2) terhadap rumah tangga miskin (Y_1) signifikan, sebab bila pemerintah daerah menaikkan belanja tidak langsungnya khususnya belanja infrastruktur seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan maka akan terjadi penurunan jumlah rumah tangga miskin.

Tabel 4.8 juga menjelaskan bahwa pengaruh langsung antar variabel, belanja tidak langsung (X_2) terhadap penurunan inflasi (Y_2) sebesar $-3,696$ persen dengan tingkat signifikansi $0,000$ atau lebih kecil dari $0,05$ yang artinya pengaruh belanja tidak langsung terhadap inflasi signifikan.

Pengaruh langsung antar variabel belanja tidak langsung (X_2) dengan pertumbuhan ekonomi (Y_3), apabila belanja tidak langsung (X_2) meningkat sebesar 1 persen akan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi (Y_3) sebesar $0,392$ persen dengan tingkat signifikansi $0,004$ atau dibawah $0,05$ persen yang artinya pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) signifikan.

Pengaruh rumah tangga miskin (Y_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) adalah sebesar -2,887 dengan tingkat signifikansi 0.306 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikan artinya bahwa ada hubungan negatif rumah tangga miskin dengan pertumbuhan ekonomi tetapi tidak signifikan.

Pengaruh inflasi (Y_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) adalah 0.044 dengan tingkat signifikansi 0,154 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikan artinya bahwa ada hubungan positif antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi tapi tidak signifikan.

C.2. Pengaruh tidak Langsung (Indirect Effect)

Pengaruh tidak langsung antar masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat, berdasarkan hasil output metode yang digunakan dapat diuraikan pengaruh tidak langsung masing-masing variabel, dimana pengaruh belanja langsung (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) melalui rumah tangga miskin (Y_1) sebesar dengan 0,121 $\alpha = 0.059$ bermakna ada hubungan positif dan signifikan. Sedangkan melalui inflasi (Y_2) sebesar 0,040 artinya apabila jumlah belanja langsung naik maka pertumbuhan ekonomi (Y_3) akan naik.

Pengaruh belanja tidak langsung (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) melalui rumah tangga miskin (Y_1) sebesar 0,058 bermakna bahwa apabila belanja tidak langsung meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat. Sedangkan melalui inflasi (Y_2) sebesar -0,163 dengan $\alpha = 0.154$ artinya ada hubungan negatif tidak signifikan.

C.3. Pengaruh Total (Total Effect).

Pengaruh total adalah pengaruh secara keseluruhan antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung pada masing-masing variabel eksogen yaitu belanja langsung (X_1), belanja tidak langsung (X_2) melalui rumah tangga miskin (Y_1) dan inflasi (Y_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3), dan untuk melihat pengaruh total masing-masing variabel eksogen terhadap masing-masing fungsi rumah tangga miskin (Y_1), fungsi inflasi (Y_2) serta pertumbuhan ekonomi (Y_3), seperti pada tabel 4.8.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik pada masing-masing jalur pengaruh langsung secara parsial, hasil analisis secara lengkap terdapat dalam analisis, dapat dilihat pada lampiran penelitian ini, sedangkan ringkasan hasil pengujian hipotesis yang diperoleh dari lampiran dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel 4.9
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Langsung	Tidak Langsung	Total
-------	----------	----------------	-------

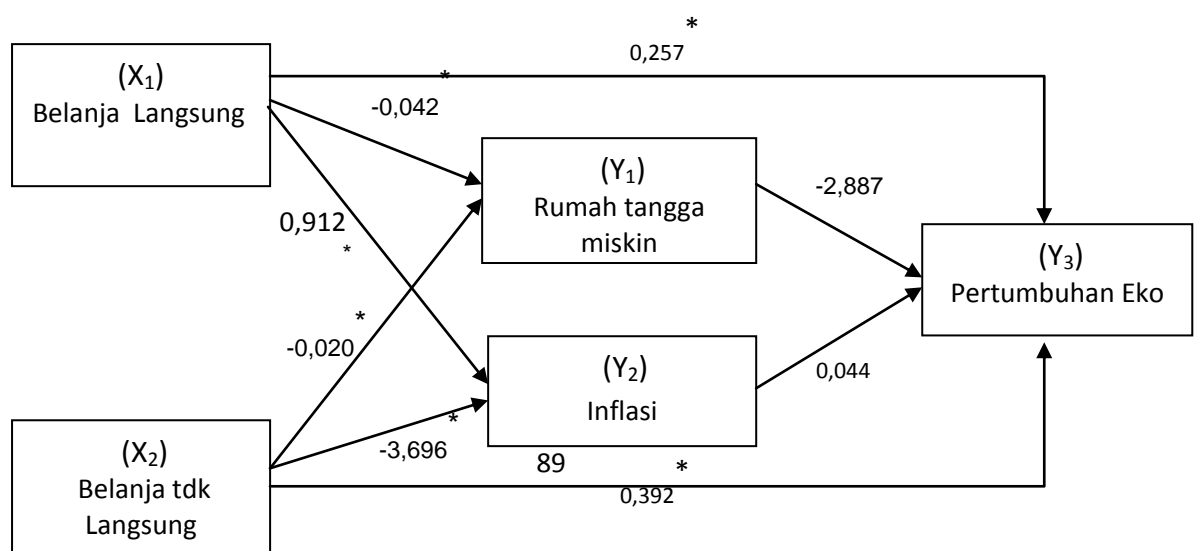
$L_n X_1 \rightarrow L_n Y_1$ $\rightarrow L_n Y_2$ $\rightarrow Y_3$	-0,042 0,912 0,257	- - $-2,887(-0,042)+(0,044)(0,912)=$ $0,021 + 0,040 =$ 0.161	-0,042 0,912 $0,257+((-2,887)(-0,042))+(0,044)(0,912)=$ $0,257+0,021 + 0,040 =$ 0.418
$X_2 \rightarrow L_n Y_1$ $\rightarrow L_n Y_2$ $\rightarrow Y_3$	-0,020 -3,696 0,392	- - $-2,887(-0,020)+(0,044)(-3,696)$ $0,056 + (-0,163)=$ -0.103	-0,020 -3,696 $0,392+((-2,887)(-0,020))+(0,044)(-3,696)=$ $0,392 + 0,059 + (-0,162) =$ 0.289
$L_n Y_1 \rightarrow Y_3$ $L_n Y_2 \rightarrow Y_3$	-2,887 0,044	- -	-2,887 0,044

Sumber ; lampiran 3, data diolah tahun 2001-2010

Dari dua variabel eksogen yang dihipotesiskan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Y_3) yang melalui rumah tangga miskin (Y_1) dan inflasi (Y_2) yaitu belanja langsung (X_1), belanja tidak langsung (X_2) dimana keduanya positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pengaruh langsung belanja langsung (X_1), dan belanja tidak langsung (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) dimana variabel tersebut positif dan signifikan.

Penjelasan secara simpel mengenai bentuk dan besaran pengaruh langsung masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model yang digunakan dapat dilihat pada nilai-nilai koefisien pada masing-masing jalur seperti pada gambar berikut :

Gambar 2
Hasil Analisis Nilai Koefisien



sumber : lampiran3, data sekunder diolah, 2011
Keterangan : * signifikansi pada tingkat 5 persen.

Berdasarkan model analisis AMOS maka diperoleh hubungan fungsional antar variabel seperti pada gambar di atas dengan menjelaskan secara sederhana mengenai koefisien pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dalam sebuah model dan nilai-nilai koefisien estimasi dan tingkat signifikansi masing-masing jalur.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.

Pada bagian ini akan diuraikan jawaban atas pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab I, dan telah dilakukan pengujian hipotesis dengan dukungan data serta kajian secara teoritis, pembahasan sistematis disesuaikan dengan tujuan penelitian serta memperhitungkan rumusan-rumusan masalah hipotesis khususnya yang terkait dengan *structural Equation Modeling* (SEM), baik secara simultan maupun secara parsial khususnya yang berkaitan dengan hubungan-hubungan fungsional seperti pengaruh jumlah rumah tangga miskin, inflasi serta belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

A. Pengaruh Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui :

A.1. Rumah Tangga Miskin.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh variabel belanja langsung (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) melalui rumah tangga miskin (Y_1) sebesar 0,121, dengan $\alpha = 0,059$, yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan, artinya apabila belanja langsung (X_1) bertambah 1 persen maka pertumbuhan ekonomi (Y_3) akan naik sebesar 0,12 persen.

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pengeluaran daerah pada pos belanja langsung, akan berimplikasi terhadap naiknya pertumbuhan ekonomi melalui rumah tangga miskin, Temuan ini memberikan indikasi bahwa di kota Jayapura belanja daerah memberikan pengaruh langsung terhadap rumah tangga miskin dimana belanja daerah dapat mempengaruhi standar hidup (pendapatan riil masyarakat miskin), melalui pemberian subsidi sandang, pangan, papan.

Belanja langsung ini sifatnya multiplier artinya mendorong sekaligus menggerakkan sektor terhubung lainnya, sebab dalam belanja langsung terdapat

belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal, dengan adanya hubungan yang positif dan signifikan pada kedua variabel karena penambahan jumlah rumah tangga miskin harus sebanding dengan belanja langsung melalui bantuan modal yang dialokasikan oleh pemerintah kota Jayapura dengan harapan dapat menurunkan angka kemiskinan, tetapi disisi lain pemerintah kota Jayapura kewalahan dalam pemberian modal usaha kepada masyarakat dalam hal ini rumah tangga miskin sebab sebagian besar rumah tangga miskin yang mendapatkan modal usaha tidak mampu dikelola dengan baik oleh mereka sehingga usaha mereka selalu macet, sebab semua pendapatan dari usaha mereka semua dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka sehari-hari.

Beberapa tahun terakhir pemberian modal usaha kepada rumah tangga miskin, pemerintah kota Jayapura bekerja sama dengan bank Papua dimana kepemilikan saham pada bank tersebut mayoritas milik pemerintah daerah dengan harapan masyarakat bisa bertanggung jawab atas modal yang diberikan, tetapi kenyataannya usaha mereka juga tidak berkembang, hal lain yang mempengaruhi adalah masih kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga miskin dalam melakukan suatu usaha dimana mereka belum mampu untuk mengelola bahan mentah menjadi barang siap jual, pada umumnya yang terjadi adalah masyarakat Papua dalam hal ini rumah tangga miskin mereka membeli barang siap jual dari masyarakat pendatang, kemudian mereka menjualnya kembali kepada konsumen dan mereka tidak sadari kalau untung yang mereka dapatkan sangat kecil, sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja sulit apalagi membayar cicilan utang atas modal yang mereka gunakan.

Secara teoritis (Wagner) dijelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang meningkat disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbal balik dalam masyarakat, dimana salah satu tujuan utama dari pengeluaran pemerintah

tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak terhadap penurunan angka kemiskinan melalui distribusi pendapatan dan rata-rata pengeluaran.

Sementara itu dijelaskan oleh Sakirah (2006) bahwa tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dibatasi oleh ketersediaan faktor-faktor produksi terutama modal, sehingga akumulasi modal sebagai penggerak pembangunan ekonomi yang menjadi titik sentral dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Temuan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusnita (2008), dalam penelitiannya analisis belanja daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan, dengan menggunakan metode analisis data time series melalui pendekatan kuantitatif dengan metode regresi dan hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berhubungan positif dan signifikan.

A.2. Inflasi

Analisis output menunjukkan bahwa pengaruh variabel belanja langsung (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) melalui inflasi (Y_2) sebesar 0,040 dengan $\alpha = 0,154$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan, artinya bahwa apabila jumlah anggaran belanja langsung (X_1) bertambah 1 persen maka pertumbuhan ekonomi (Y_3) naik sebesar 0,05 persen, Pada hipotesis diduga bahwa belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rumah tangga miskin, inflasi dan hasil analisis membuktikan bahwa hipotesis diterima, walaupun pengaruh tersebut

masih melalui variabel inflasi tetapi tetap memberikan kontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan ini terjadi karena inflasi dipandang dari sisi suplay dimana dengan adanya kenaikan harga-harga barang akan mendorong para produsen untuk menambah jumlah produknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kota Jayapura terdapat pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi, artinya belanja pemerintah masih melalui suatu proses yaitu peningkatan tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan khususnya peningkatan gizi bagi anak-anak yang kurang mampu.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di kota Jayapura terdapat pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi, artinya bila pemerintah kota Jayapura menaikkan belanja langsungnya khususnya pada pos belanja modal maupun belanja barang dan jasa yang diperuntukan untuk rumah tangga miskin dengan harapan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi kenyataan yang didapatkan dari penelitian ini bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah semuanya di peruntukkan bagi kepentingan konsumsi mereka, sementara disisi lain pergerakan sektor konsumsi dapat terjadi begitu cepat melalui pengeluaran agregat yang semakin mendorong tingginya permintaan untuk tujuan konsumtif dan bukan untuk tujuan investasi, dengan bertambahnya jumlah uang beredar akan memberikan konsekuensi meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa, karena kemudahan mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi.

Secara teoritis dari Suparmoko (dalam Adisasmita (2001) pengeluaran pembangunan (belanja tidak langsung) merupakan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan dengan kata lain untuk meningkatkan

kemakmuran secara merata dan serasi antar daerah dan antar golongan, dilaksanakan melalui upaya bidang ekonomi, prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang merangsang dan menimbulkan dampak kegiatan ekonomi secara lebih luas dan intensif, kriteria ini sekaligus berarti perluasan lapangan dan kesempatan kerja, Jadi pengeluaran pembangunan yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai.

Temuan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hariady (2008), dalam penelitiannya dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dengan menggunakan metode analisis data panel melalui pendekatan kuantitatif dengan metode regresi dan hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mampu menjelaskan variasi nilai variabel tak bebas pertumbuhan ekonomi sebesar 81,88 persen terhadap variabel bebas, sedangkan 18,12 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model.

A.3 Pengaruh Langsung Belanja Langsung (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y_3).

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai pengaruh langsung variabel belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,257 dengan $\alpha = 0,059$, yang bermakna bahwa apabila jumlah anggaran belanja langsung di naikkan 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,05 persen, hasil analisis menunjukkan bahwa dengan semakin bertambahnya anggaran belanja langsung akan berdampak pada naiknya pelayanan untuk membantu rakyat miskin, disisi lain anggaran yang

diperuntukkan bagi sektor-sektor ekonomi unggulan yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi juga stabil.

Dengan meningkatnya jumlah uang beredar dalam masyarakat yang diimbangi dengan persediaan stok barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menyebabkan roda perekonomian berjalan dengan baik maka otomatis pertumbuhan ekonomi akan meningkat, dan disamping itu juga pemerintah kota Jayapura, perlu memperhatikan regulasi kebijakan anggaran terutama dalam pembagian anggaran secara proporsional.

Secara teoritis, bila belanja daerah efisien dan efektif untuk menjangkau rumah tangga miskin, peningkatan belanja daerah terhadap bantuan sosial, secara luas dipandang memiliki dampak yang besar serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan penduduk khususnya bagi penduduk yang berpenghasilan rendah, peningkatan pengeluaran pemerintah seperti subsidi pangan memiliki dampak yang besar khususnya pada pendapatan dan gisi yang secara langsung sangat berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan, hal ini tergantung pada keefektipan belanja pemerintah daerah untuk bias menjangkau rakyat miskin.

Pandangan lain juga mengatakan bahwa untuk memperbaiki angka kemiskinan yang merupakan indikator kesejahteraan masyarakat tidak selalu dengan merangsang pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, tetapi perlu adanya kebijakan yang akan menguntungkan penduduk yang masuk kategori rumah tangga miskin terutama kebijakan dari pemerintah bagaimana memberdayakan rumah tangga miskin yang diberi modal usaha agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung secara terus-menerus kepada bantuan pemerintah, sehingga kedepannya rumah tangga tersebut sudah bisa

mandiri untuk membiayai sendiri kebutuhan lainnya seperti kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan.

Jenis lain dari pengeluaran pemerintah yang secara langsung memberikan dampak yang besar bagi mereka yang miskin adalah alokasi pengeluaran pembangunan infrastruktur khususnya daerah-daerah atau lingkungan yang banyak dihuni oleh penduduk miskin. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian diatas adalah pemerintah seharusnya lebih serius dalam memperhatikan pos anggaran untuk bantuan yang langsung berdampak pada penduduk miskin yang pengalokasiannya bukan saja pada sisi kuantitasnya tetapi yang lebih utama adalah pada sisi kualitasnya.

Distribusi belanja pemerintah yang tetap memprioritaskan/ memperhatikan sektor-sektor unggulan merupakan salah satu kebijakan yang dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi, sebab anggaran yang secara proporsional baik pada sektor non unggulan maupun sektor unggulan dan apabila pemerintah daerah tidak memperhatikan hal tersebut maka ini merupakan pemborosan anggaran yang tidak ada kontribusinya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui :

B.1. Rumah Tangga Miskin

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh variabel belanja tidak langsung (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) melalui rumah tangga miskin (Y_1) sebesar 0,058 dengan $\alpha = 0,004$, yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan, artinya apabila belanja tidak langsung (X_2) bertambah 1 persen maka pertumbuhan ekonomi (Y_3) akan naik sebesar 0,004 persen.

Hasil analisis ini sangat menarik untuk dikaji karena belanja tidak langsung yang masih melalui variabel antara yaitu rumah tangga miskin, ternyata sesuai hasil analisis yang digunakan masih berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui belanja tidak langsung, ini disebabkan karena tingkat kemahalan harga barang yang terjadi kota di Jayapura jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, hal ini terjadi karena besarnya biaya yang ditanggung oleh produsen untuk mensuplay barang-barang tersebut, oleh itu pemerintah kota Jayapura menambah anggaran belanja tidak langsungnya guna memberikan subsidi silang terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Secara teoritis bahwa biaya yang lebih tinggi menyebabkan harga produk menjadi lebih tinggi. Dengan demikian inflasi akan terjadi serta adanya ketidakelestarian dari suplai atau produksi bahan makanan. Pertumbuhan bahan makanan tidak secepat pertumbuhan penduduk dan penghasilan per kapita, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri cenderung naik melebihi kenaikan harga barang-barang lain.

B.2. Inflasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung variabel belanja tidak langsung (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) melalui inflasi (Y_2) sebesar -0.162 dan $\alpha = 0,004$ artinya bahwa apabila belanja tidak langsung (X_2) bertambah sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi (Y_3) akan turun sebesar 0,162 persen.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di kota Jayapura terdapat pengaruhnegatif dan signifikan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi, artinya bila pemerintah kota Jayapura menaikkan belanja tidak

langsungnya khususnya pada pos belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial dan belanja hibah yang diperuntukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak diimbangi dengan tersedianya barang-barang yang mereka butuhkan, ini semakin mendorong tingginya permintaan barang untuk tujuan konsumsi dan bukan untuk tujuan investasi, dengan bertambahnya jumlah uang beredar akan memberikan konsekuensi meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok tetapi tidak diimbangi dengan persediaan barang yang cukup sehingga berdampak pada naiknya harga barang.

Secara teoritis bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan perekonomiannya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia sehingga timbul apa yang disebut dengan *inflationary gap* (celah inflasi).

B.3. Pengaruh Langsung Belanja tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.392 dengan $\alpha = 0,004$ yang bermakna bahwa apabila belanja tidak langsung meningkat 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,4 persen, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, temuan ini berarti dapat menerima teori dan hipotesis.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah khususnya di pos anggaran belanja tidak langsung, oleh karena itu pemerintah kota Jayapura dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan aktivitas perekonomian. Hal ini sejalan dengan Gupta et.al., (2002) yang menyatakan bahwa secara lebih spesifik efektivitas pengeluaran pemerintah dapat memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi, dimana pemerintah yang kredibel berkontribusi terhadap pelaksanaan aktivitas perekonomian yang dapat mendukung proses pembangunan.

Belanja tidak langsung khususnya belanja investasi pemerintah kota Jayapura banyak digunakan untuk kepentingan publik, tujuan untuk meningkatkan persediaan barang kebutuhan masyarakat dengan harapan agar persediaan barang berimbang dengan permintaan dari masyarakat, tetapi dari sisi lainnya pemerintah kota Jayapura tidak menyadari efek lain yang muncul dimana pertumbuhan ekonomi semakin turun karena kurangnya pasokan anggaran ke sektor ekonomi unggulan.

Implikasi dari pengeluaran pemerintah pada pos belanja tidak langsung menyebabkan kehidupan masyarakat semakin membaik, dalam kaitanya dengan perekonomian secara umum, semakin tinggi kualitas hidup masyarakat pada suatu tempat atau daerah, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan daerah tersebut, semakin tinggi kualitas hidup yang merupakan investasi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan berimplikasi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

Secara teoritis dalam keadaan ini masyarakat telah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata uang. masyarakat cenderung enggan memegang uang kas, begitu menerima uang kas, masyarakat cenderung langsung membelanjakannya. Dimana masyarakat memiliki harapan bahwa laju inflasi di bulan-bulan mendatang lebih besar dari laju inflasi

bulan-bulan sebelumnya. Keadaan ini ditandai dengan makin cepatnya peredaran uang, dalam keadaan ini penambahan jumlah uang sebesar 10 persen misalnya, akan menyebabkan kenaikan harga-harga lebih besar dari 10 persen.

Belanja daerah harus difokuskan pada sektor-sektor pembangunan yang secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi seperti belanja modal yang bisa menyediakan infrastruktur dan barang-barang kebutuhan masyarakat yang tidak disediakan oleh pihak swasta karena hal ini berpengaruh terhadap pembentukan indeks harga yang membentuk pertumbuhan ekonomi, temuan diatas sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dirjaharta (2008) dalam penelitiannya pengaruh pengangguran, inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

C. Pengaruh Rumah Tangga Miskin terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh rumah tangga miskin (Y_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) sebesar - 2.887 dengan $\alpha = 0,306$ artinya bahwa terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikan yang bermakna walaupun ada kenaikan jumlah rumah tangga miskin (Y_1) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) karena alokasi belanja modal sangat kecil dan juga sangat minim untuk tujuan investasi, selain itu rumah tangga yang mendapatkan modal dari pemerintah tidak investasikan melainkan mereka hanya gunakan untuk tujuan konsumsi. Hal tersebut terjadi pada rumah tangga miskin karena minimnya pengetahuan mereka dalam mengelolah keuangan rumahtangganya.

Salah satu kebijakan pemerintah adalah memajukan kebutuhan dasar bagi rumah tangga miskin misalnya kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan dimana pendidikan berperan penting bagi masyarakat terutama bagi kelangsungan hidupnya dan dalam

mensukseskan pembangunan, hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Gorton (1976) bahwa melalui pendidikan maka insan manusia dapat memperoleh pengalaman, kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang sangat berguna bagi kelangsungan hidupnya.

Rumah tangga miskin akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi apabila pendapatan masyarakat tidak semuanya digunakan untuk tujuan konsumsi, tetapi sebagian untuk tabungan sehingga dapat mendorong investasi, investasi pemerintah yang bersumber dari alokasi belanja langsung sulit untuk menurunkan angka kemiskinan sehingga mereka semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Temuan ini sama dengan hasil penelitian oleh Robert (2003) di kabupaten Merauke dengan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa rakyat miskin di kabupaten Merauke berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

D. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh inflasi (Y_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) sebesar 0.044 dengan $\alpha = 0,154$ artinya bahwa ada hubungan yang positif tetapi tidak signifikan yang bermakna bahwa di kota Jayapura tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak karena seharusnya apabila inflasi naik akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun sesuai dengan hasil analisis diatas hal yang berbeda justru terjadi di kota Jayapura, ini terjadi karena dipengaruhi oleh efek ganda dimana inflasi dilihat dari sisi suplay bila harga barang naik maka produsen akan terdorong untuk lebih menambah jumlah stok barang karena pada saat itu pula produsen merauo keuntungan yang tinggi, sedangkan dari sisi yang lain masyarakat

Papua umumnya hampir semua pendapatannya dibelanjakan untuk keperluan konsumsi, sedangkan untuk tabungan (save) diabaikan, padahal bila *marginal propensity to save* lebih besar dari *marginal propensity to consume* ini akan lebih cepat merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Belanja operasional merupakan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah bukan untuk kepentingan publik. Belanja operasional dapat dilakukan efisiensi dan lebih diprioritaskan kepada peningkatan output berupa barang dan jasa yang dapat menstabilkan harga sehingga jumlah barang ditawarkan sama atau melebihi permintaan.

Hal lain yang menyebabkan hal ini terjadi karena adanya pemborosan serta kebocoran anggaran di kalangan birokrasi yaitu tinggi intensitas biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kota Jayapura, proyek-proyek fiktif, serta adanya manipulasi pada anggaran suatu program yang dijalankan.

Temuan ini sama dengan penelitian Ramandey (2007) dengan hasil penelitiannya bahwa inflasi berhubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Sarmi.

Dalam perspektif ekonomi, kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam mengarahkan aktifitas ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi negara, pemerataan distribusi pendapatan, namun demikian dampak dari kebijakan fiskal kepada aktifitas ekonomi sangatlah luas. Dampak langsung aktifitas pemerintah terhadap perekonomian daerah ditunjukkan oleh besar-kecilnya pengeluaran pemerintah, sehingga pengelolaan besaran pengeluaran pemerintah yang tidak tepat justru akan tingginya inflasi dan merugikan perekonomian.

Permasalahan lain yang mungkin ditimbulkan oleh ketidaktepatan kebijakan fiskal adalah adanya kenaikan inflasi, artinya peningkatan pengeluaran pemerintah tidak diimbangi

produksi barang yang beredar dalam masyarakat, justru akan menurunkan investasi swasta dan berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan pengeluaran anggaran pemerintah harus memberikan dampak kepada berbagai indikator makro ekonomi suatu daerah, agar aktifitas perekonomian daerah berada pada tingkat optimumnya dengan dukungan sektor swasta, maka diperlukan pengelolaan fiskal yang efisien dan tingkat pengeluaran pemerintah yang optimum.

E. Efisiensi Penggunaan Belanja Daerah.

Efisiensi pengeluaran pemerintah menggambarkan perbandingan antara besarnya realisasi belanja daerah dengan realisasi anggaran yang tersedia, kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1(satu) atau dibawah 100 persen, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh anggaran yang diterimanya, hal itu perlu dilakukan karena meskipun daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata anggaran yang dikeluarkan lebih besar, efisiensi dan efektivitas sering dikaitkan walaupun sebenarnya terdapat perbedaan diantara keduanya, menurut Suwandi efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil dengan cara membandingkan antara input dan outputnya. Efisien namun tidak efektif berarti baik dalam

memanfaatkan sumber daya (input) tetapi tidak tepat sasaran sedangkan efektif namun tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumberdaya berlebihan, tidak efektif dan tidak efisien artinya ada pemborosan sumberdaya tanpa mencapai sasaran.

Keberhasilan penggunaan belanja daerah dalam tahun anggaran 2001 – 2010 mencerminkan indikator pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jayapura, yang secara ringkas disajikan dalam tabel 5.6 mengenai gambaran tentang tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas belanja daerah melalui program dan kegiatan pada pemerintah Kota Jayapura yang diukur dengan tolok ukur capaian fisik dengan realisasi anggaran yang digunakan atas program dan kegiatan yang dimaksud, seperti pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Efisiensi Belanja Daerah Kota Jayapura
Tahun 2001 – 2010

No	Tahun	A P B D	JUMLAH BELANJA	EFISIENSI
1	2001	141,444,104,717	135,482,771,672	95.79
2	2002	229,067,117,332	220,540,423,987	96.28
3	2003	233,418,946,623	260,730,731,112	111.70
4	2004	269,866,608,776	266,538,475,954	98.77
5	2005	303,268,910,826	279,452,991,899	92.15
6	2006	442,315,220,617	411,155,380,549	92.96
7	2007	672,372,371,987	639,850,519,817	95.16
8	2008	547,378,487,459	523,129,777,222	95.57
9	2009	584,712,575,170	619,588,285,420	105.96
10	2010	613,082,989,143	621,092,521,267	101.31

Sumber : BPKAD Kota Jayapura, 2011

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi penggunaan belanja daerah sudah sangat efisien dimana dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ada 7 tahun yang capaian persentase yang didapatkan dibawa 100 persen, tetapi ada 3 tahun yang tidak efisien yaitu 2003, 2009 dan 2010 yang capaian persentasenya diatas 100 persen artinya bahwa dalam 3 tahun tersebut terjadi defisit anggaran sehingga pemerintah daerah harus mencari pinjaman guna menutupi defisit anggaran tersebut yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian maka hipotesis keempat diterima.

Jika pengeluaran pemerintah mampu menjadi pemandu peningkatan ekonomi negara, maka peningkatan pada pengeluaran pemerintah akan meningkatkan aktifitas perekonomian dengan adanya peningkatan investasi, peningkatan investasi tersebut akan memiliki dampak pula pada peningkatan output, kesempatan kerja, ekspor, pajak, penerimaan pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran Pemerintah atau pembiayaan pembangunan pemerintah adalah tidak terlepas dari pembicaraan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) satu tahun anggaran. Pengeluaran Pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin (belanja pegawai, belanja barang, belanja rutin daerah, bunga dan cicilan utang dan pengeluaran rutin lainnya) dan pengeluaran pembangunan diantaranya pembiayaan rupiah (tabungan pemerintah, pinjaman program) pembiayaan proyek-proyek yang bisa menyentuh langsung ke masyarakat miskin. Hubungan kausal yang ada pada ekonomi makro pada pokoknya adalah hubungan variabel-variabel ekonomi agregatif diantaranya yang banyak dipersoalkan antara lain tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving, investasi nasional, jumlah uang beredar, dari hubungan antara variabel-variabel diatas yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian kita ambil untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut. Bilamana ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan pengeluaran pemerintah. Jadi terjadi hubungan kausal atau hubungan sebab – akibat antara meningkatnya pengeluaran konsumsi pemerintah dengan menurunnya tingkat kemiskinan.

F. Efektivitas Penggunaan Belanja Daerah.

Realisasi pendapatan daerah selama tahun anggaran 2001 – 2010, menunjukkan persentase realisasi rata-rata diatas jumlah yang targetkan yakni sebesar 102,10 persen artinya tingkat efektivitas Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Jayapura sangat efektif dimana realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat kecuali pada tahun 2004, seperti yang ditunjukkan pada table 5.7.

Pemerintah kota Jayapura dalam mencapai tujuan untuk menurunkan jumlah rakyat miskin maka penggunaan belanja daerah harus betul-betul menggunakan belanjanya secara efektif, dengan penggunaan anggaran seperti itu akan mendorong sektor-sektor ekonomi daerah yang bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perbaikan taraf perekonomian yang bisa berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan semakin mempercepat penurunan angka kemiskinan di kota Jayapura, dalam data penelitian penurunan rumah tangga miskin setiap tahun sudah mengalami perubahan tetapi belum signifikan jika dibandingkan dengan anggaran belanja daerah yang digunakan oleh pemerintah kota Jayapura.

Tabel 5.2

Efektivitas Anggaran Belanja Daerah Kota Jayapura
Tahun 2001 – 2010

No	Tahun	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Efektivitas
1	2001	137,661,494,995	141,444,104,717	102.75
2	2002	225,439,473,045	229,067,117,332	101.61
3	2003	268,240,571,400	233,418,946,623	87.02
4	2004	268,942,292,000	269,866,608,776	100.34
5	2005	286,801,186,000	303,268,910,826	105.74
6	2006	422,904,700,000	442,315,220,617	104.59
7	2007	665,977,127,000	672,372,371,987	100.96
8	2008	515,741,923,500	547,378,487,459	106.13
9	2009	572,358,995,570	584,712,575,170	102.16
10	2010	611,109,904,420	613,082,989,143	100.32

Sumber : BPKAD Kota Jayapura, 2011

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas anggaran daerah 90 persen efektif karena hanya tahun 2003 yang target pencapaian realisasi tidak tercapai, dimana anggaran ditargetkan sebesar 268,240,571,400 dan hanya terealisasi sebesar 233,418,946,623 atau hanya 87,02 persen, sedangkan 9 tahun tingkat efektivitas semuanya tercapai dan tahun 2008 merupakan pencapaian tingkat efektivitas yang tertinggi yang dicapai oleh pemerintah kota Jayapura dalam satu dasawarsa.

Untuk menilai suatu kegiatan efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh pencapaian tujuan yang telah dicapai dengan baik atau sebaliknya. Dalam hubungannya dengan penggunaan belanja daerah, pengukuran efektivitas belanja daerah dapat menjelaskan secara konkrit

sejauh mana anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Adapun tolak ukur yang dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas yaitu pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh variabel belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung terdapat pengaruh positif dan signifikan, hasil analisis bermakna bahwa apabila belanja langsung meningkat maka akan berimplikasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Pengaruh langsung variabel belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi terdapat pengaruh positif dan signifikan, pengaruh tidak langsung melalui rumah tangga miskin juga berhubungan positif tapi tidak signifikan sedangkan melalui inflasi terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikan.
3. Tingkat efisiensi penggunaan belanja daerah sudah efisien karena capaian persentase rata-rata per tahunnya 91,88 persen, artinya bahwa anggaran yang tersedia hampir semua habis terdistribusi/digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan dan juga efektivitas realisasi anggaran sangat efektif, tetapi belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan juga kontribusinya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap tahun anggaran belanja tidak langsung selalu lebih besar dari belanja langsung, penulis menyarankan agar anggaran belanja tidak langsung harus lebih kecil dari dari belanja langsung, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah mengurangi perjalanan dinas para pejabat ataupun pegawai lainnya.
2. Sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa secara umum pemerintah Kota Jayapura sudah efisien secara teknis penggunaan belanja daerah tetapi pembagian anggaran tidak proporsional artinya anggaran yang tersedia tidak didistribusikan dengan memperhatikan sektor ekonomi mana yang perlu mendapatkan anggaran yang lebih besar dan sektor mana yang anggarannya harus dikurangi. Peningkatan efisiensi ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi pemborosan belanja pada pos-pos anggaran yang tidak produktif. Langkah ini dilakukan dengan meningkatkan fasilitas dan layanan kepada masyarakat Kota Jayapura sesuai dengan kebutuhan yang telah ditargetkan. Dengan adanya peningkatan fasilitas dan layanan sesuai kebutuhan masyarakat diharapkan besarnya belanja yang dikeluarkan pemerintah akan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Jayapura.
3. Penelitian ini mempunyai keterbatasan serta jauh dari kesempurnaan yang sebaiknya dijadikan masukan bagi penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu adanya keterbatasan dan perbedaan karakteristik data dengan penelitian yang menjadi acuan. Perbedaan tersebut menyebabkan analisis efisiensi dalam penelitian ini dilakukan secara parsial. Hendaknya pada penelitian selanjutnya yang sejenis perlu dilakukan analisis secara keseluruhan untuk memperoleh hasil studi yang lebih komprehensif.

Number of variables in your model: 8
 Number of observed variables: 5
 Number of unobserved variables: 3
 Number of exogenous variables: 5
 Number of endogenous variables: 3

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed	0	0	3	0	0	3
Labeled	0	0	0	0	0	0
Unlabeled	11	0	2	2	3	18
Total	11	0	5	2	3	21

Number of distinct sample moments: 20
 Number of distinct parameters to be estimated: 18
 Degrees of freedom (20 - 18): 2

Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y1 <--- X1	-.042	.007	-5.872	***	par_2
Y2 <--- X1	.912	.658	1.387	.165	par_3
Y2 <--- X2	-3.696	.498	-7.419	***	par_5
Y1 <--- X2	-.020	.005	-3.724	***	par_6
Y1 <--- e1	.006	.001	4.282	***	par_9
Y2 <--- e2	.553	.129	4.282	***	par_10
Y3 <--- X1	.257	.136	1.885	.059	par_1
Y3 <--- X2	.392	.135	2.904	.004	par_4
Y3 <--- Y2	.044	.031	1.425	.154	par_7
Y3 <--- Y1	-2.887	2.819	-1.024	.306	par_8
Y3 <--- e3	.051	.012	4.282	***	par_11

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
Y1 <--- X1	-.774
Y2 <--- X1	.171
Y2 <--- X2	-.912
Y1 <--- X2	-.491
Y1 <--- e1	.399
Y2 <--- e2	.372
Y3 <--- X1	.424
Y3 <--- X2	.856
Y3 <--- Y2	.387
Y3 <--- Y1	-.259
Y3 <--- e3	.306

Means: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
X1	26.186	.159	164.770	***	par_12
X2	25.439	.210	121.216	***	par_13

Intercepts: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y1	11.660	.233	50.088	***	par_14
Y2	82.954	21.389	3.878	***	par_15
Y3	14.103	33.027	.427	.669	par_16

Variances: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
e1	3.000				
e2	3.000				
e3	3.000				
X1	.232	.108	2.141	.032	par_17
X2	.404	.189	2.141	.032	par_18

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
Y2	.861
Y1	.841
Y3	.906

Matrices (Group number 1 - Default model)

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model)

Total Effects (Group number 1 - Default model)

	X2	X1	Y2	Y1
Y2	-3.696	.912	.000	.000
Y1	-.020	-.042	.000	.000
Y3	.289	.418	.044	-2.887

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)

	X2	X1	Y2	Y1
Y2	-.912	.171	.000	.000
Y1	-.491	-.774	.000	.000
Y3	.631	.691	.387	-.259

Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	X2	X1	Y2	Y1
Y2	-3.696	.912	.000	.000
Y1	-.020	-.042	.000	.000
Y3	.392	.257	.044	-2.887

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	X2	X1	Y2	Y1
Y2	-.912	.171	.000	.000
Y1	-.491	-.774	.000	.000
Y3	.856	.424	.387	-.259

Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	X2	X1	Y2	Y1
Y2	.000	.000	.000	.000
Y1	.000	.000	.000	.000
Y3	-.103	.161	.000	.000

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	par 1	par 2	par 3	par 4	par 5	par 6	par 7	par 8	par 9	par 0	par 1	par 1	par 1	par 1	par 1	par 15	par -1 6	par 1 7	par 1 8
1	9																		
par r_2	.0 0	.0 0																	
par r_3	.0 0	.0 0	.4 33																
par r_4	.0 0	.0 0	.0 00	.0 1 8															
par r_5	.0 0	.0 0	.0 00	.0 0	.2 4 8														
par r_6	.0 0	.0 0	.0 00	.0 0	.0 0	.0 0													
par r_7	.0 0	.0 0	.0 00	.0 0	.0 0	.0 0	.0 1												
par r_8	.3 3	.0 0	.0 00	.1 6	.0 0	.0 0	.0 0	7. 94											
par r_9	.0 0	.0 0	.0 00	.0 0	.0 0	.0 0	.0 0	.0 00	.0 0										
par r_10	.0 0	.0 0	.0 00	.0 0	.0 0	.0 0	.0 0	.0 00	.0 0	.0 1 7									
par r_11	.0 0	.0 0	.0 00	.0 0	.0 0	.0 0	.0 0	.0 00	.0 0	.0 0	.0 0								
par r_12	.0 0	.0 0	.0 00	.0 0	.0 0	.0 0	.0 0	.0 00	.0 0	.0 0	.0 0	.0 2 5							
par r_13	.0 0	.0 0	.0 00	.0 0	.0 0	.0 0	.0 0	.0 00	.0 0	.0 0	.0 0	.0 0	.0 4 4						

	p ar - 1	p ar - 2	p ar - 3	p ar - 4	p ar - 5	p ar - 6	p ar - 7	p ar - 8	p ar - 9	pa r_ 10	pa r_ 11	pa r_ 12	pa r_ 13	pa r_ 14	pa r_ 15	pa r_ 16	pa r_ 17	pa r_ 18
r_ 4	9 4	0 0	0 0	0 0														
pa r_ 5	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	1. 0 0													
pa r_ 6	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	1. 0 0												
pa r_ 7	- .2 0 5	.0 0 0	.0 0 0	.8 4 0	.0 0 0	.0 0 0	1. 0 0											
pa r_ 8	.8 7 0	.0 0 0	.0 0 0	.4 2 1	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	1. 0 0										
pa r_ 9	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	1. 0 0									
pa r_ 10	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	1. 00 0								
pa r_ 11	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 00 0	1. 00 0							
pa r_ 12	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 00 0	.0 00 0	1. 00 0						
pa r_ 13	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 00 0	.0 00 0	.0 00 0	1. 00 0					
pa r_ 14	.0 0 0	- .8 0 5	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	- .5 9 3	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 00 0	.0 00 0	.0 00 0	.0 00 0	1. 00 0				
pa r_ 15	.0 0 0	.0 0 0	- .8 0	.0 0 0	- .5 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 00 0	.0 00 0	.0 00 0	.0 00 0	.0 00 0	1. 00 0			

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	18	25.212	2	.000	12.606
Saturated model	20	.000	0		
Independence model	5	89.198	15	.000	5.947

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	.717	-1.120	.734	-1.346	.687
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	.133	.096	.092
Saturated model	.000	.000	.000
Independence model	1.000	.000	.000

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	23.212	10.578	43.281
Saturated model	.000	.000	.000
Independence model	74.198	48.130	107.773

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	2.292	2.110	.962	3.935
Saturated model	.000	.000	.000	.000
Independence model	8.109	6.745	4.375	9.798

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	1.027	.693	1.403	.000
Independence model	.671	.540	.808	.000

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	61.212	104.412		
Saturated model	40.000	88.000		
Independence model	99.198	111.198		

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	5.565	4.416	7.389	9.492
Saturated model	3.636	3.636	3.636	8.000
Independence model	9.018	6.648	12.070	10.109

Model	HOELTER	HOELTER
	.05	.01

Model	HOELTER .05	HOELTER .01
Default model	3	5
Independence model	4	4

Minimization: .031
Miscellaneous: 1.826
Bootstrap: .000
Total: 1.857